



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017**

Batang, Maret 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Batang dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang yang menggambarkan kinerja seluruh jajaran pemerintahan tentu harus kita tanggapi secara proporsional. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus kita pertahankan dan tumbuhkembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal kita lihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi *stakeholders* dan instansi terkait lainnya serta penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Batang, Maret 2018

BUPATI BATANG,

H. WIKAJI, S.Ag, M.Pd.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Batang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Batang, Maret 2018

INSPEKTUR

KABUPATEN BATANG,



Dra. LANI DWI REJEKI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 198503 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Batang	1
B Lingkungan Strategis	34
C Permasalahan Utama	44
D Tujuan dan Manfaat LKJ IP	47
E Sistematika Penyajian	47
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	49
A Perencanaan Kinerja	49
B Perjanjian Kinerja	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN BATANG TAHUN 2017	70
A Pengukuran dan Analisa Kinerja	71
1. Tujuan mewujudkan reformasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik baik, bersih, transparan dan adil	83
2. Tujuan mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan standar layanan yang baik, cepat dan transparan serta penguatan Inovasi Daerah.....	86
3. Tujuan mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	89
4. Tujuan Mengembangkan perekonomian daerah dan peningkatan investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja.....	93

5. Tujuan pengembangan perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan berkelanjutan	96
6. Tujuan meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan mewujudkan ketahanan pangan daerah	100
7. Tujuan meningkatkan perekonomian berbasis masyarakat melalui koperasi dan sektor kebudayaan dan pariwisata	105
8. Tujuan meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah	110
9. Tujuan Pengembangan wilayah pemukiman penduduk dan perumahan layak huni	114
10. Tujuan Pengembangan dan pemerataan sarana perhubungan dan transportasi publik	116
11. Tujuan Peningkatan kualitas kependudukan dan kesejahteraan sosial	117
12. Tujuan meningkatkan kualitas dan peran perempuan, kepemudaan, dan keolahragaan dalam aspek kehidupan masyarakat.....	122
13. Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat	124
14. Tujuan Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan.....	129
15. Tujuan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan standar layanan prima	130
B REALISASI ANGGARAN	134
BAB IV PENUTUP	136
A KESIMPULAN	136
B LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA	138
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri secara optimal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Batang senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Batang maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk mencapai 25 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata

capaian kinerja 25 sasaran adalah 108,97%, keberhasilan ini dicapai karena dari 25 sasaran strategis yang ditetapkan, 13 (tiga belas) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja diatas 100% ke atas (Sangat Baik/Sangat Berhasil), 10 (sepuluh) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara >75% sampai dengan 100% (Baik/Berhasil), dan 2 (dua) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara 55% sampai dengan 75% (Cukup Baik/Cukup Berhasil). Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	1.	Persentase SDM perencana yang telah memperoleh pendidikan / pelatihan teknis perencanaan	75	100	133,3
		2.	Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)	90%	100%	111,11
					122,22	
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	1.	Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPD	100%	100%	100
		2.	Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Renstra OPD	100%	100%	100
		3.	Tingkat kesesuaian RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	100
					100	
3	Meningkatnya layanan dan informasi publik	1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	15	15	100
					100	
4	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah	1	Inovasi aplikasi dalam website milik pemerintah daerah	50	50	100
		2	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	1 LPPL	1 LPPL	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
		3	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25	25	100
						100
5	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP (kali)	4	4	100
		2	Jumlah Linmas per desa	10	19	190
		3	Rasio pos kamling per desa / kelurahan	5	7,79	155,8
		4	Prosentase demo yang tertangani	100	100	100
						136,45
6	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi	1	Jumlah LSM	115	115	100
						100
7	Meningkatnya penanaman modal di daerah	1	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	146,49	421,09	287,45
		2	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500	82	16,4
		3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000	1150	115
		4	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	3.500	2903	82,94
						125,45
8	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor	1	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,17	2,31	180,52
		2	Pencari kerja yang ditempatkan	50%	29,22%	58,44
		3	Keselamatan dan perlindungan	45%	22%	48,89
						95,95
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain	1	Revitalisasi pasar rakyat	25%	25%	100
		2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	16,12%	12,97%	80,46
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap	16,71%	14,68%	87,85

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
	melalui revitalisasi pasar tradisional		PDRB (ADHK)			
		4	Ekspor Bersih Perdagangan	71.997.875,47	15.405.503,27	21,40
					72,43	
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan	1	Pertumbuhan Industri (unit)	10,851	10,758	99
		2	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	26,05%	33,65%	129
		3	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,50%	33,77%	122,8
		4	Jumlah Unit usaha sentra industri	255	268	105
					114,05	
11	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian	1	Nilai tukar petani (%)	100,31	100,4	100,09
		2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	27	23,09	85,52
		3	Cakupan Bina Kelompok Peternak	40	41	102,50
		4	Ketersediaan Lahan Ternak	86,89	140,757	161,99
		5	Cakupan bina kelompok pengawas	360	0	0,00
		6	Tingkat Konsumsi ikan	35	27,61	78,89
		7	Tingkat Pengelolaan Konservasi	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	100,00
		8	Cakupan bina kelompok Tangkap	65	35	53,85
		9	Cakupan bina kelompok Budidaya	70	10	14,29
		10	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklamsar)	45	30	66,67
					76,38	
12	Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan	1	Populasi hewan ternak (ekor)			
			- Sapi perah	165	96	58,18
			- Sapi potong	20.000	20.770	103,85

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan	- Kerbau	1.550	1.403	90,52
		- Kambing	80.000	80.590	100,74
		- Domba	33.500	32.769	97,82
		- Ayam buras	767.769	777.902	101,32
		- Ayam ras	24.000.000	970.000	4,04
		- Itik	113.000	113.679	100,60
2		Produksi perikanan tangkap (ton)	40.000	32.072	80,18
3		Produksi perikanan budidaya (ton)	3.888,86	3.092	79,51
4		Ketersediaan pangan utama (ton)			
		- Beras	181.951	125.272	68,85
		- Jagung	44.206	74.044	167,50
5		Produksi hasil ternak			
		- Daging	9.800.000	1.354.320	13,82
		- Telur	7.100.000	7.125.807	100,36
		- Susu	120.000	87.500	72,92
6		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100	100	100
7		Persentase harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	100	100	100
8		Cadangan pangan daerah	5	5	100,00
9		Ketersediaan energi dan protein per kapita			
		- Energi per kapita	2.400	2.836	118,17
	- Protein per kapita	60,00	89,70	149,5	
10	Skor Pola Ppangan Harapan (PPH) daerah	85	84	98,82	
11	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100	100	100	
12	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
		13	Penanganan Daerah Rawan Pangan	62	67	108,06
		14	Produktivitas padi sawah	4,79	4,862	101,50
		15	Produksi padi	196.600	222.954	113,405
		16	Produktivitas jagung	6,496	7,867	121,11
		17	Produksi jagung	45.541	83.195	182,68
		18	Jumlah kelompok tani binaan	885	887	100,23
						97,71
13	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM	1	Persentase koperasi aktif (%)	74	61,5	83,11
		2	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	101.600	101.550	99,95
		3	Jumlah bank dan cabang	74	65	87,84
		4	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	7	3	42,86
		5	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,5-5,6	-	-
		6	Laju inflasi	5±1	-	-
		7	PDRB per kapita ADHK	4,89	-	-
		8	Indeks Gini	0,304	-	-
		9	Indeks Pembangunan Manusia	74,01	-	-
		10	Presentase Penduduk Miskin	11,66	-	-
						78,44
14	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal	1	Kunjungan Wisata	444.635	521.105	117,20
		2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	12	18	150
		3	Obyek Wisata yang ditangani	5	9	180
		4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	2.000.000.000	2.404.864.000	120,24
		5	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	94	96	102,13
		6	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	10	12	120
						131,59

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
15	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	95	60,98	64,19
		2	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) (>40 km/jam)	80	51,16	63,95
		3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	83,16	46	55,32
		4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	96,40%	100%	103,73
		5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,22	0,22	100
		6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	36,21%	26,83%	74,096
		7	Lingkungan Pemukiman	24,28	20	82,37
					77,67	
16	Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur	1	Ketaatan terhadap RTRW, (%)	100	72,73	72,73
		2	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	5,73	15,35	267,89
					170,31	
17	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat	1	Rasio Rumah layak huni (%)	72	75,27	104,54
		2	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	55	73,04	132,8
		3	Rumah tangga pengguna air bersih	76,00%	77,10%	101,45
		4	Lingkungan pemukiman kumuh	0,18	0,946	19
		5	Persentase pemohon sertifikat terlayani	91%	85%	93,41
		6	Prona (Program Nasional) yang terlayani	600	1700	283
					122,43	

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
18	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik	1	Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan	539	590	109,46
						109,46
19	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan	1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	80	29,48	36,85
		2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	40	29,27	73,175
						55,01
20	Terwujudnya penyelenggaraan KB / KS	1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	119.816	130.238	108,70
		2	Cakupan peserta KB aktif (%)	85	82,53	97,09
						102,90
21	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi	1	Kepemilikan KTP el (%)	90	87	96,67
		2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	557	556	99,82
		3	Pengiriman Transmigran (KK)	5	5	100,00
		4	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun	15.888	91.346	574,94
						217,86
22	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)	1,95	1,21	62,05
		2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	195.526	278818	142,60
		3	Rasio KDRT	0	0,004	96,00
		4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	200.674	282.231	140,64
		5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100
						108,26
23	Terwujudnya jaminan	1	Angka usia harapan hidup (tahun)	71	74,46	104,87

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
	penyelenggaraan kesehatan masyarakat Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat	2	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100
		3	Kasus Kematian Ibu	16	16	100,00
		4	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	11,5	12,73	90,34
		5	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15,5	15,59	99,42
		6	Incident rate DBD per 100.000 penduduk	15,5	15,59	99,42
		7	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk	20	6,94	165,30
		8	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)	1	0,48	152,00
		9	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk	10,50%	7,11%	132,29
		10	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	76	106	71,70
				1	Angka usia harapan hidup (tahun)	100%
						102,56
24	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	7%	7%	100
						100
25	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM	1	Angka Melek Huruf (%)	100	99,47	99,47
		2	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	7,2	7,19	99,86
		3	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	75	80,39	107,19
		4	Angka Partisipasi Kasar			
			Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A	105	104,78	99,79
			Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B	95	95,49	100,52

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C	55	49,56	90,11
		5 Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk			
		-Jenjang SD/Sederajat	52	67,39	129,60
		-Jenjang SMP/Sederajat	20	26,21	131,05
		-Jenjang SMA/Sederajat	9,2	11,98	130,22
		6 Angka Partisipasi Murni			
		Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95	94,52	99,49
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	82,66	80,85	97,81
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C	50	49,56	99,12
					107,02
		Rata-rata Capaian IKU			108,97

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2017 termasuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok

ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat.

3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.
4. Kurang seimbangannya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional.
5. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka langkah-langkah untuk peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

2. Perlu adanya penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya.
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar perangkat daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

1. Kedudukan

Kabupaten Batang merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. Sebelum berlakunya Undang-undang tersebut Kabupaten Batang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pekalongan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 2) SATPOL PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Dinas Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
- 6) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- 7) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 9) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 11) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 14) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 16) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan;
- 17) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

e. Badan Daerah, terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan
- 3) Badan Kepegawaian Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- f. Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Kecamatan Batang;
 - 2) Kecamatan Tulis;
 - 3) Kecamatan Warungasem;
 - 4) Kecamatan Wonotunggal;
 - 5) Kecamatan Bandar;
 - 6) Kecamatan Blado;
 - 7) Kecamatan Reban;
 - 8) Kecamatan Kandeman;
 - 9) Kecamatan Tersono;
 - 10) Kecamatan Gringsing;
 - 11) Kecamatan Subah;
 - 12) Kecamatan Limpung;
 - 13) Kecamatan Banyuputih;
 - 14) Kecamatan Pecalungan; dan
 - 15) Kecamatan Bawang.
- g. Selain perangkat Daerah di atas terdapat juga lembaga lain yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;

- 5) pelaksanaan administrasi inspektorat;
- 6) pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
- 7) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
- 8) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 3) penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 4) penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perencanaan, penganggaran, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan teknologi informasi, keuangan, aset dan barang milik pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab dinas.
- 5) fasilitasi perijinan dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pengelolaan kebudayaan daerah;

- 6) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal yang meliputi pembinaan kelembagaan, pembiayaan, pengembangan kurikulum dan penilaian, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;
- 7) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar yang meliputi pembinaan kelembagaan, pembiayaan, pengembangan kurikulum dan penilaian, penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional, pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter serta peningkatan prestasi peserta didik;
- 8) pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan mutu dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal/informal dan kebudayaan;
- 9) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga kebudayaan;
- 10) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, nilai budaya, tradisi, kesenian dan kebahasaan;
- 11) pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
- 12) pelaksanaan pembinaan satuan pendidikan dan UPT Dinas;
- 13) pelaksanaan fasilitasi stakeholder pendidikan dan kebudayaan;
- 14) pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 15) pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaporan kebijakan dan permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan

- 16) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 4) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 5) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 6) penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 7) pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 8) peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat;
- 9) pelaksanaan mitigasi dan pencegahan bencana, termasuk bencana kebakaran;
- 10) penanganan terhadap bencana kebakaran;

- 11) penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - 12) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - 13) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - 14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - 15) penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP; dan
 - 16) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 4) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 5) pembinaan umum dan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 6) pembinaan terhadap lembaga perangkat daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7) penyelenggaraan penyusunan data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 8) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 10) pembinaan terhadap UPTD di lingkungan DP3AP2KB;
 - 11) penyelenggaraan kesekretariatan DP3AP2KB; dan
 - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- h. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 6) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 7) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 8) pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- 9) pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;

- 10) pengendalian teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 11) pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 12) pengawasan dan koordinasi dalam rangka konservasi sumber daya alam;
 - 13) pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 14) pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - 15) penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
 - 16) pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
 - 17) pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengelolaan limbah tinja dan limbah B3;
 - 18) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 19) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DLH;
 - 20) penyelenggaraan kesekretariatan DLH; dan
 - 21) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 6) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 7) pelaksanaan koordinasi bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 8) pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata;
- 9) pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan Bidang Pemasaran dan Sumber Daya Manusia ;
- 10) peningkatan sumber daya manusia Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- 11) pelaksanaan koordinasi bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 12) pelaksanaan administrasi dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 13) pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- 14) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 15) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas pariwisata, kepemudaan, dan olahraga;

- 16) penyelenggaraan kesekretariatan dinas pariwisata, kepemudaan, dan olahraga; dan
- 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 3) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 4) pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) penyelenggaraan pelayanan semua perizinan dan non perizinan;
- 6) menyelenggarakan penghitungan, penetapan, dan pemungutan retribusi semua perizinan dan non perizinan;
- 7) pengkoordinasian pengaduan perizinan dan non perizinan;
- 8) pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- 9) monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - 10) fasilitasi penyelenggaraan ketransmigrasian;
 - 11) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DPMPTSP dan Naker;
 - 12) penyelenggaraan ketatausahaan DPMPTSP dan Naker; dan
 - 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan tugas pembantuan yang diberikan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar dan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta;

- 5) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 6) monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 7) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Disperindagkop dan UKM;
 - 8) penyelenggaraan kesekretariatan Disperindagkop dan UKM; dan
 - 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- I. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan;
 - 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - 5) pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - 6) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - 7) pengelolaan sumber daya kesehatan;
 - 8) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - 9) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
 - 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;

- 11) pengelolaan perijinan bidang kesehatan;
- 12) pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;
- 13) peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan;
- 14) penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
- 15) pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- 16) pengembangan manajemen bidang kesehatan;
- 17) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah sakit Umum Daerah;
- 18) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang kesehatan;
- 19) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 20) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- 21) pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta; dan
- 22) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 3) pengelolaan teknis perizinan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 6) pelaksanaan administrasi DPU dan PR; dan
 - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan, dan tugas pembantuan yang diberikan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 6) pengelolaan teknis perizinan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 7) pelaksanaan pelayanan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 8) pelaksanaan administrasi DPRKP;
 - 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - 10) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DPRKP;
 - 11) penyelenggaraan kesekretariatan DPRKP; dan
 - 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 6) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) penyelenggaraan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 8) penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- 9) pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- 10) pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;

- 11) pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
 - 12) pelaksanaan administrasi Disdukcapil;
 - 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 14) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 15) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Disdukcapil;
 - 16) penyelenggaraan kesekretariatan Disdukcapil; dan
 - 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 6) pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - 7) pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - 8) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 9) pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
 - 10) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur, administrasi, pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
 - 11) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - 12) penelitian dan pengkajian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 13) pelaksanaan pengolahan, pengkajian, dan penyajian profil desa;
 - 14) pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
 - 15) monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 16) penyelenggaraan kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- q. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan.
 - 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - 5) penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
 - 6) penyelenggaraan manajemen transportasi;
 - 7) pengelolaan manajemen perparkiran;
 - 8) pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 - 9) penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
 - 10) pengendalian teknis di bidang perhubungan;
 - 11) penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
 - 13) penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
 - 14) penyelenggaraan kesekretariatan Dishub;
 - 15) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
 - 16) monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
 - 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, statistik dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 3) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 5) penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
- 6) pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
- 7) pelayanan terhadap permohonan informasi sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- 8) pengembangan dan pemeliharaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9) pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- 10) penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
- 11) pelaksanaan pengamanan informasi dan berita sandi;
- 12) pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis persandian dan telekomunikasi;
- 13) penyelenggaraan kesekretariatan Diskominfo;
- 14) monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- s. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian sub urusan peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 3) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 5) pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 6) pengoordinasian pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- 7) pengoordinasian pengembangan produksi peternakan;
- 8) pengelolaan rekomendasi teknis perizinan di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 9) pengendalian teknis di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 10) pengembangan teknologi dan penyebaran informasi bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 11) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- 12) penyelenggaraan kesekretariatan Dislutkannak;
- 13) monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- t. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- 5) pembinaan umum dan teknis di bidang sosial
- 6) Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 7) pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data PMKS dan PSKS serta analisis data untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
- 8) penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- 9) penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- 10) pelaksanaan Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu;
- 11) penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
- 12) pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- 13) pemeliharaan dan pengembangan taman makam pahlawan/makam pahlawan;
- 14) pengelolaan teknis perizinan di bidang sosial;
- 15) monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial;
- 16) pembinaan terhadap UPTD di lingkungan Dinas Sosial;
- 17) penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 5) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 6) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 7) pelaksanaan koordinasi bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 8) penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 9) pengembangan dan peningkatan budaya dan minat baca masyarakat;

- 10) pengembangan perpustakaan digital;
 - 11) peningkatan ketertiban pengelolaan arsip pada perangkat daerah, lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan swasta;
 - 12) monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 13) penyelenggaraan kesekretariatan dinas perpustakaan dan kearsipan; dan
 - 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- v. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan;
 - 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - 5) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- 6) penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
- 7) pengoordinasian dan penyusunan perencanaan tata ruang;
- 8) penyusunan perencanaan kebijakan anggaran daerah;
- 9) pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- 10) pengembangan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas perangkat daerah;
- 11) perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- 12) pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
- 13) pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 14) pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- 15) penyiapan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 16) penyelenggaraan kesekretariatan Bapelitbang; dan
- 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

w. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;

- 2) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 4) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 5) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 6) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 7) penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 8) pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
- 9) pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 10) pelayanan teknis dan administratif di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 11) penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- 12) penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan;
- 13) penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- 14) penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 15) penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- 16) penyelenggaraan kesekretariatan BPKPAD;
 - 17) pelaksanaan pengelolaan, inventarisasi dan pemberdayaan aset daerah; dan
 - 18) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- x. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- 1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 5) pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
 - 6) pelaksanaan pelayanan penunjang dalam bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur;
 - 7) pelayanan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 8) pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen kepegawaian;
 - 9) pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen informasi kepegawian berbasis teknologi;

- 10) pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - 11) pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - 12) penyelenggaraan kesekretariatan BKD; dan
 - 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- y. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :
- 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- z. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan;
- 2) Perumusan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 6) Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- 1) menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- 3) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- 5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 8) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

4. Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 adalah 6.985 orang, dengan 3.573 laki-laki dan 3.412 perempuan.

Adapun rekapitulasi PNS menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.1
REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

STATUS	TINGKAT PENDIDIKAN											
	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	Sar mud	S1	S2	S3	Jumlah
PNS	200	198	1.045	23	295	885	8	49	3.872	409	1	6.985

Sumber : BKD Kabupaten Batang Tahun 2017

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

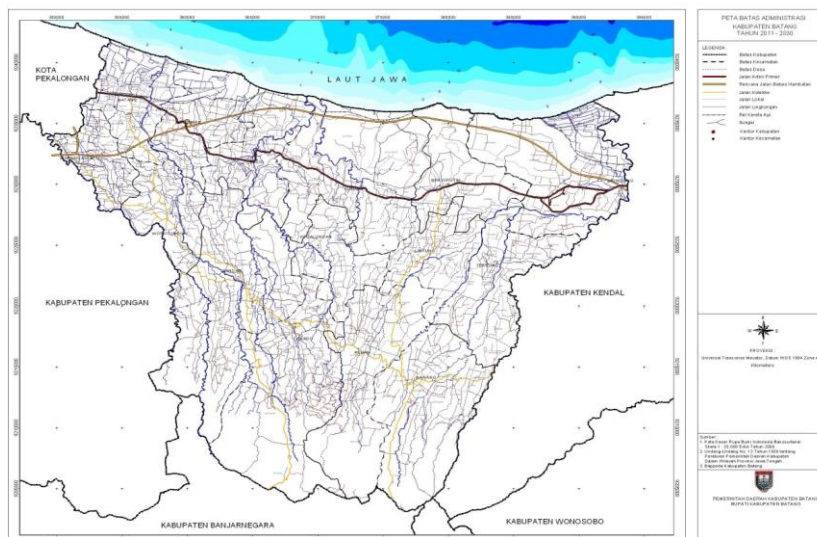
Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6° 51' 46" dan 7° 11' 47" Lintang Selatan serta antara 109° 40' 19" dan 110° 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.

- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

Gambar I.1
Peta Administrasi Kabupaten Batang



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2011, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan dengan perincian adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Batang : 12 Desa 9 Kelurahan.
- Kecamatan Wonotunggal : 15 Desa.
- Kecamatan Warungasem : 18 Desa.
- Kecamatan Bandar : 17 Desa.
- Kecamatan Blado : 18 Desa.
- Kecamatan Reban : 19 Desa.
- Kecamatan Tulis : 17 Desa.
- Kecamatan Subah : 17 Desa.

- Kecamatan Limpung : 17 Desa.
- Kecamatan Gringsing : 15 Desa.
- Kecamatan Bawang : 20 Desa.
- Kecamatan Tersono : 20 Desa.
- Kecamatan Kandeman : 13 Desa.
- Kecamatan Pecalungan : 10 Desa.
- Kecamatan Banyuputih : 11 Desa.

b. Luas Wilayah

Kabupaten Batang yang memiliki wilayah seluas 78.864,16 Ha, yang dibagi dalam 15 (lima belas) Kecamatan. Wilayah tersebut dapat dirinci menurut luas wilayah per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel I.2
Luas Wilayah Kecamatan

Luas Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (ha)
1	Wonotunggal	15	5.235,27
2	Bandar	17	7.332,80
3	Blado	18	7.838,92
4	Reban	19	4.633,38
5	Bawang	20	7.384,51
6	Tersono	20	4.932,98
7	Gringsing	15	7.276,64
8	Limpung	17	3.341,66
9	Banyuputih	11	4.442,50
10	Subah	17	8.352,17
11	Pecalungan	10	3.618,97
12	Tulis	17	4.508,78
13	Kandeman	13	4.175,67
14	Batang	21	3.434,54
15	Warungasem	18	2.355,38
	Total	248	78.864,16

Sumber: Batang Dalam Angka 2016

c. Iklim dan Kondisi Tanah

Kabupaten Batang yang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) memiliki iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada bulan Oktober-April dan musim kemarau pada bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun.

Menurut data pengukuran tinggi curah hujan yang ada di setiap kecamatan, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2015 di Kecamatan Blado dan paling sedikit di Kecamatan Gringsing, sedangkan curah hujan yang paling tinggi di Kecamatan Reban dan paling rendah di Kecamatan Tulis.

Wilayah Kabupaten Batang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut: latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47%; dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya.

1. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2016 tercatat sejumlah 749.720 jiwa, yang terdiri dari 374.375 jiwa penduduk laki-laki dan 375.345 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-

laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 99,74%.

b. Struktur Usia Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

- Usia 0 – 14 tahun : 184.173 jiwa (24,56%)
- Usia 15 – 64 tahun : 515.905 jiwa (68,82%)
- Usia 65 keatas : 49.642 jiwa (6,62%)

c. Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Oleh karena itu bidang pendidikan menjadi tumpuan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan memasuki sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan data, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang didominasi lulusan Sekolah Dasar, sehingga hal ini tentunya menjadi perhatian pokok dalam pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Batang.

Kondisi rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Batang semakin membaik dari kondisi tahun 2015 sebesar 6,67 meningkat menjadi 6,81.

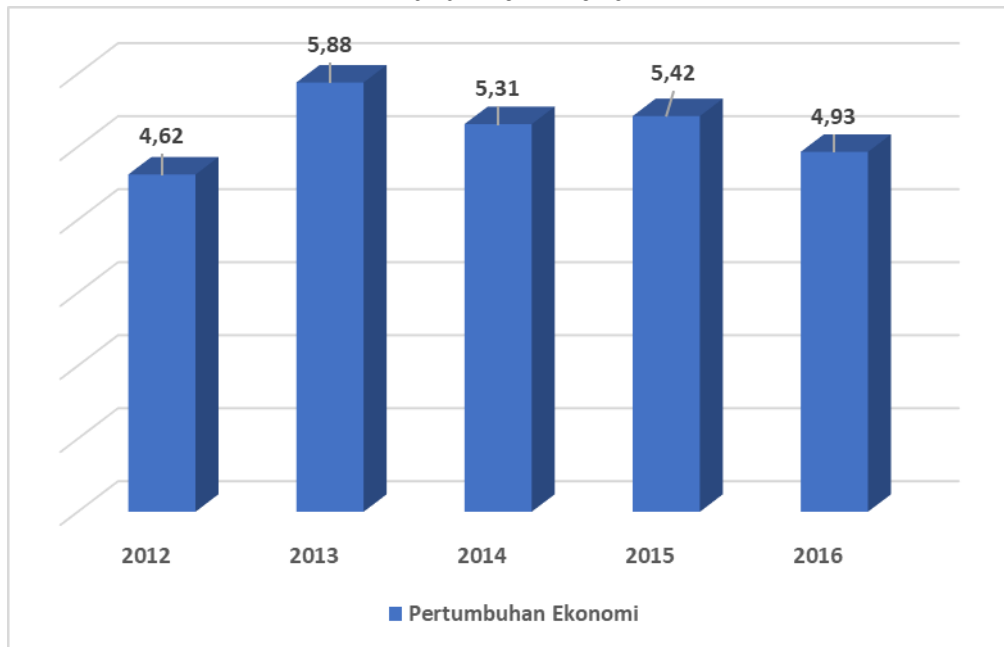
2. Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya 2015 sebesar 5,42% menjadi 4,93% (2016) dan pertumbuhan ekonomi ini dibawah capaian pertumbuhan ekonomi Jawa tengah sebesar 5,28% (2016). Selengkapny kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang

selama tahun 2012-2016 tampak pada gambar berikut ini:

Gambar I.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang
Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kabupaten Batang 2017

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang tidak terlepas dari sumbangan masing masing sektor perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Batang mengalami fluktuasi tiap tahunnya namun mengalami trend kenaikan.

Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2016 berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang Rp. 5.787.554.45 dari total PDRB disusul sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.3.971.951.74 lalu diikuti oleh sektor perdagangan, Besar dan Eceran sebesar Rp.2.231.137.40.

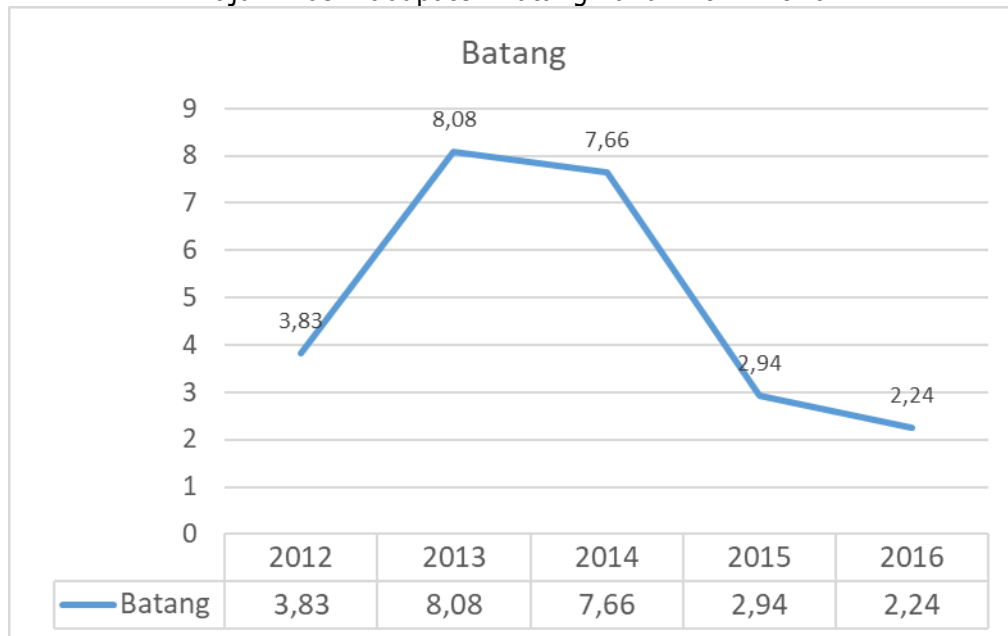
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2016 sebesar 4,93% jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih tergolong rendah karena berada dibawah Kabupaten yang lain seperti Kabupaten Pekalongan sebesar 5,16%, Kabupaten Wonosobo sebesar 5,25%, Kota Pekalongan sebesar 5,36%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 5,41%, Kabupaten Kendal

sebesar 5,60%, dan juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,28% dan Nasional Sebesar 5,01%,

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun 2016 sebesar 2,24% mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya 2015 (2,94%), Selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

Gambar I.3
Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kabupaten Batang 2017

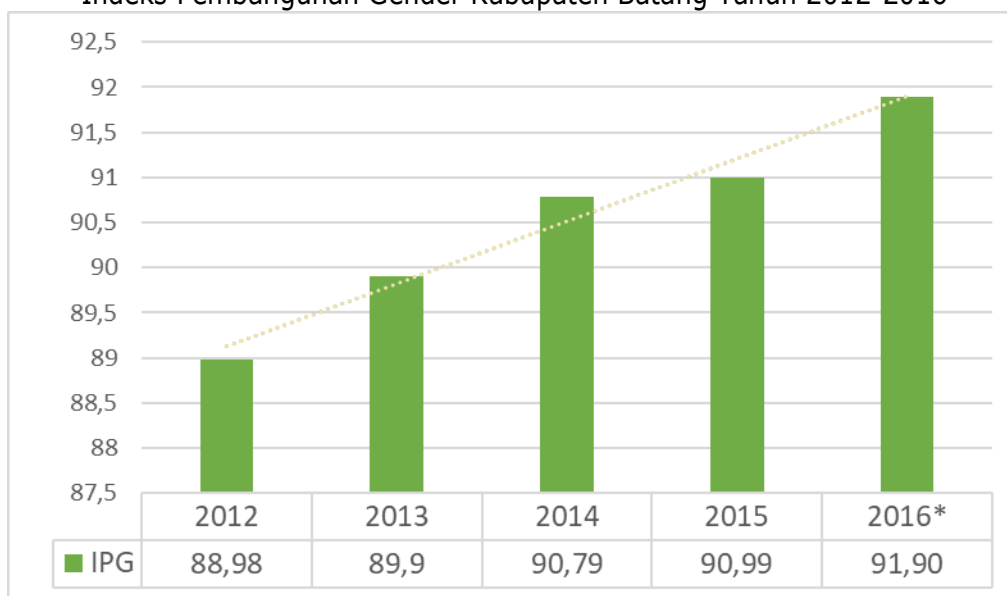
Laju inflasi Kabupaten Batang tahun 2016 sebesar 2,24% jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar adalah yang paling rendah, angka tersebut lebih rendah dari Kabupaten Kendal sebesar 2,47%, Kabupaten Pekalongan sebesar 2,96%, Kabupaten Wonosobo sebesar 2,97%, Kota Pekalongan sebesar 2,94%, dan Kabupaten Banjarnegara sebesar, begitu pula jika dibandingkan dengan Jawa Tengah (2,36%) dan Nasional (3,88%) angka tersebut masih lebih rendah.

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Batang selama periode 2012-2016 secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 88,98 menjadi 90,99 di tahun 2015, sedangkan data proyeksi tahun 2016 adalah 91,90. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini :

GAMBAR I.4

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Batang Tahun 2012-2016



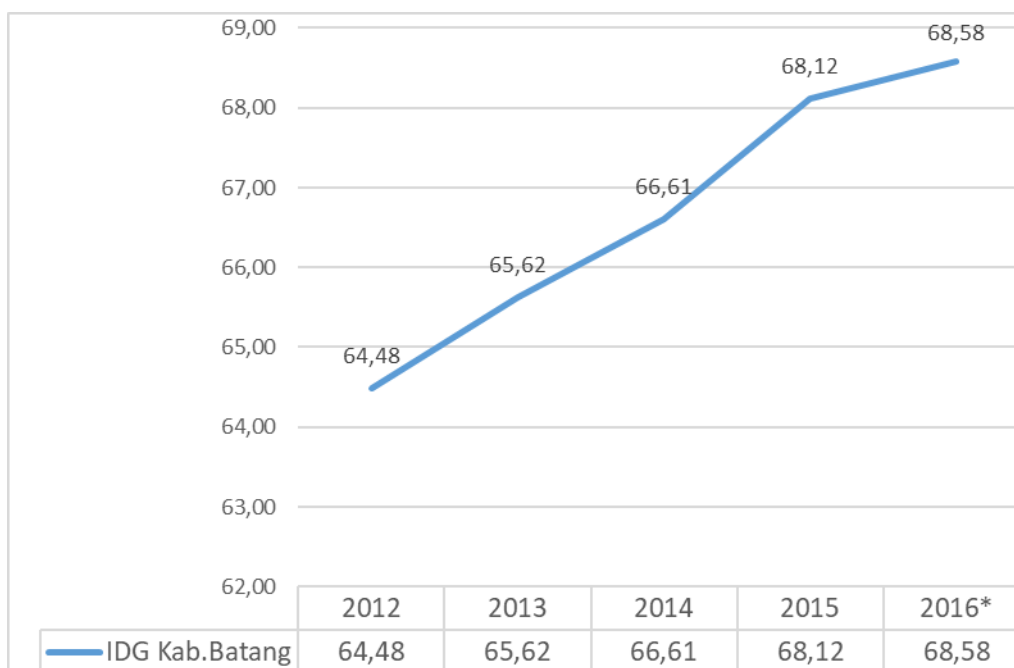
Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2017

*Data Proyeksi

d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Batang selama periode 2012-2016 secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 64,48 menjadi 65,62 di tahun 2013, kemudian meningkat kembali di tahun 2014 menjadi 66,61 hingga tahun 2015 angka IPG di Kabupaten Batang sebesar 68,12. Sedangkan angka proyeksi tahun 2016 adalah 68,58, Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini :

GAMBAR I.5
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Batang Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kabupaten Batang 2017

*Data Proyeksi

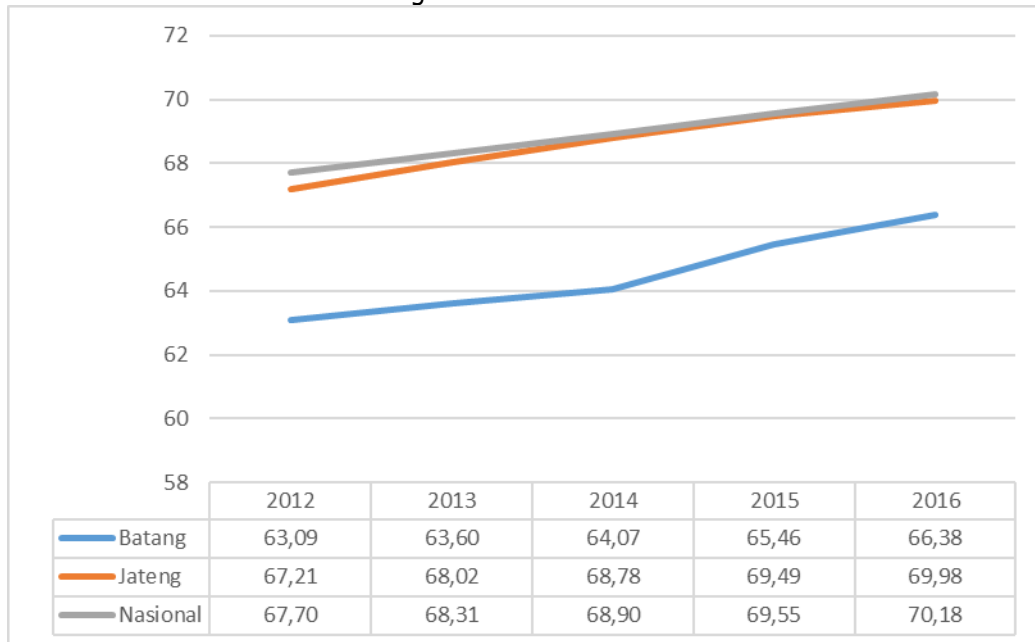
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Batang mencapai 63,60 meningkat menjadi 64,07 pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 65,46 pada tahun 2015 dan

tahun 2016 menjadi 66,38. Akan tetapi, Perkembangan IPM Kabupaten Batang pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (69,49). Perkembangan IPM Kabupaten Batang dapat dilihat pada gambar yang tersaji dibawah ini.

Gambar I.6
IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah), 2017

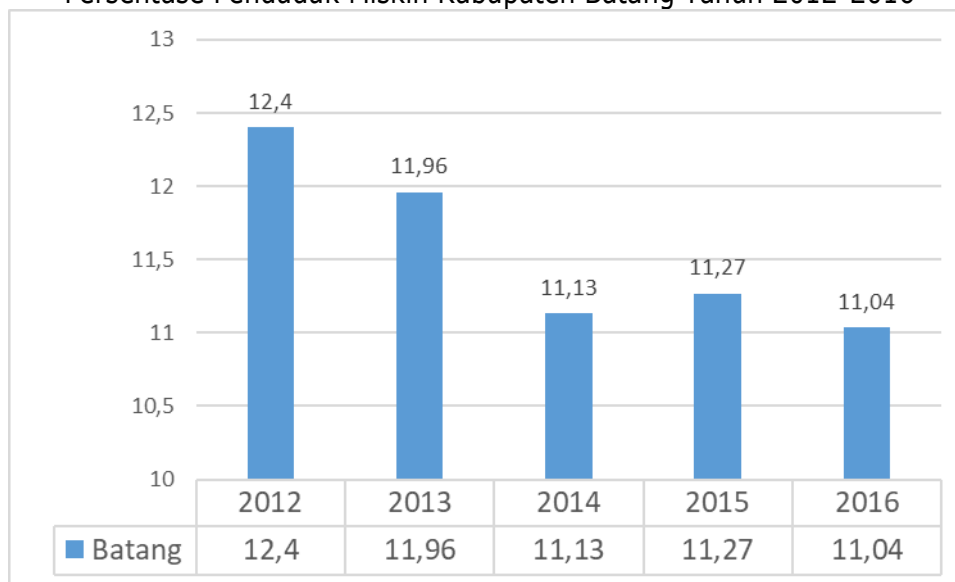
Capaian IPM Kabupaten Batang, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Banjarnegara (65,52) dan Kabupaten Wonosobo (66,19), namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Pekalongan (67,71), Kabupaten Kendal (70,11) dan Kota Pekalongan (73,32).

f. Prosentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Batang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2016. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang pada tahun 2012 adalah sebesar 12,40% menurun pada tahun 2013 menjadi 11,96% dan menurun kembali ada tahun 2014 menjadi 11,13% atau menurun 0,83 poin. Namun demikian, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 11,27% kemudian turun

kembali pada tahun 2016 menjadi 11,04%. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I.7
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2017

Persentase penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2016 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Batang lebih rendah dari Kabupaten Kendal (11,37%), Kabupaten Banjarnegara (17,46%), Kabupaten Wonosobo (20,53%), Kabupaten Pekalongan (12,9%) namun masih lebih tinggi dari Kota Pekalongan dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,92%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Batang sebesar 11,04% juga lebih baik dari Jawa Tengah sebesar 13,27%, akan tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 10,70%. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Batang dengan daerah sekitar, Jawa Tengah dan Nasional

C. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan Utama (*strategic issued*) merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Hal ini perlu menjadi perhatian

sebab Permasalahan Utama memiliki dampak bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Permasalahan Utama sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Ketika Permasalahan Utama berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila Permasalahan Utama berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Identifikasi Permasalahan Utama secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan selama jangka waktu 5 tahun.

Permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang permasalahan yaitu permasalahan penataan dan pembinaan birokrasi; permasalahan iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah; permasalahan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan permasalahan kualitas sumber daya masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang pada periode Tahun 2007-2011, maka dapat dirumuskan beberapa Permasalahan Utama (strategic issued) Kabupaten Batang pembangunan 5 (lima) tahun kedepan tahun 2012-2017, yaitu:

1. Penataan dan Pembinaan Birokrasi
 - a. Reformasi birokrasi yang menyeluruh dalam 8 area perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
 - b. Reformasi pelayan publik untuk mewujudkan pelayanan prima dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- c. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Iklim Investasi Yang Berkorelasi pada Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Daerah
 - a. Peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan peran Koperasi dan UKM dalam usaha perdagangan, dan orientasi kebijakan industri yang *pro growth, pro poor, pro job* dan *pro environment*.
 - b. Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 3. Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
 - a. Peningkatan dan Revitalisasi infrastruktur daerah untuk meningkatkan perekonomian.
 - b. Pengembangan wilayah pemukiman yang layak huni dengan memperhatikan pola pemanfaatan lahan terhadap norma-norma yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.
 4. Kualitas Sumber Daya Masyarakat dalam Pembangunan
 - a. Peningkatan dan Pemerataan derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
 - b. Peningkatan peran serta perempuan, dan kepemudaan dalam pembangunan, disamping optimalisasi sarana dan prasarana olahraga di daerah.
 - c. Optimalisasi dan pengembangan sarana kesehatan sehingga mampu dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan.
 - e. Redesain sistem pendidikan dari wajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar dua belas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan.

D. TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja Tahun 2017 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2012 - 2017 sebagai penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Batang periode tahun 2012 - 2017 adalah :

”Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintahan harus bisa bekerja secara efektif, bersih dan professional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang 2012–2017 tersebut, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 15 (lima belas) tujuan dan 25 (dua puluh lima) sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD 2012-2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	1.	Persentase SDM perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan teknis perencanaan
		2.	Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	1.	Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPD
		2.	Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Renstra OPD
		3.	Tingkat kesesuaian RKPD dengan Renja OPD
3	Meningkatnya layanan dan informasi publik	1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan
4	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah	1	Inovasi aplikasi dalam website milik pemerintah daerah
		2	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi
		3	Peningkatan SDM pengelola kearsipan
5	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan	1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)
		2	Jumlah satuan Linmas per desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
	agama	3	Rasio poskamling per desa/ kelurahan
		4	Persentase demo yang tertangani
6	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi	1	Jumlah LSM
7	Meningkatnya penanaman modal di daerah	1	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)
		2	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang
		3	Jumlah penyerapan tenaga kerja
		4	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan
8	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor	1	Tingkat pengangguran Terbuka (%)
		2	Pencari kerja yang ditempatkan
		3	Keselamatan dan perlindungan
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional	1	Revitalisasi pasar rakyat
		2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)
		4	Ekspor Bersih Perdagangan
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan	1	Pertumbuhan Industri (unit)
		2	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)
		3	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK
		4	Jumlah Unit usaha sentra industri
11	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian	1	Nilai tukar petani (%)
		2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB
		3	Cakupan Bina Kelompok Peternak
		4	Ketersediaan Lahan Ternak
		5	Cakupan bina kelompok pengawas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
		6	Tingkat Konsumsi ikan
		7	Tingkat Pengelolaan Konservasi
		8	Cakupan bina kelompok Tangkap
		9	Cakupan bina kelompok Budidaya
		10	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklahsar)
12	Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan	1	Populasi Hewan ternak (ekor)
			- Sapi Perah
			- Sapi Potong
			- Kerbau
			- Kambing
			- Domba
			- Ayam buras
			- Ayam ras
			- Itik
		2	Produksi perikanan Tangkap (ton)
		3	Produksi perikanan Budidaya (ton)
		4	Ketersediaan pangan utama (ton)
			- Beras
			- Jagung
		5	Produksi hasil ternak :
			- Daging
			- Telur
			- Susu
		6	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan
		7	Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan
		8	Cadangan Pangan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
		9	Ketersediaan energi dan protein per kapita
			- Energi per kapita
			- Protein per kapita
		10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah
		11	Stabilitas harga dan pasokan pangan
		12	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
		13	Penanganan Daerah Rawan Pangan
		14	Produktivitas Padi sawah
		15	Produksi Padi
		16	Produktivitas Jagung
		17	Produksi Jagung
		18	Jumlah Kelompok Tani Binaan
		13	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM
		2	Usaha Mikro dan Kecil (unit)
		3	Jumlah bank dan cabang
		4	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang
		5	Pertumbuhan PDRB (ADHK)
		6	Laju inflasi
		7	PDRB per kapita ADHK
		8	Indeks Gini
		9	Indeks Pembangunan Manusia
		10	Presentase Penduduk Miskin
14	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal	1	Kunjungan Wisata
		2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)
		3	Obyek Wisata yang ditangani
		4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB
		5	Jenis, kelas, dan jumlah restoran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
		6	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
15	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
		2	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) (>40 km/jam)
		3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)
		4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
		5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk
		6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
		7	Lingkungan Pemukiman
16	Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur	1	Ketaatan terhadap RTRW, (%)
		2	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)
17	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat	1	Rasio Rumah layak huni (%)
		2	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)
		3	Rumah tangga pengguna air bersih
		4	Lingkungan pemukiman kumuh
		5	Persentase pemohon sertifikat
		6	Prona (Program Nasional) yang terlayani
18	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik	1	Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan
19	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan	1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
		2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)
20	Terwujudnya penyelenggaraan KB /	1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
	KS	2	Cakupan peserta KB aktif (%)
21	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi	1	Kepemilikan KTP el (%)
		2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
		3	Pengiriman Transmigran (KK)
		4	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun
22	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)
		2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta
		3	Rasio KDRT
		4	Partisipasi angkatan kerja perempuan
		5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
23	Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup (tahun)
		2	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
		3	Kasus Kematian Ibu
		4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
		5	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
		6	Incident rate DBD per 100.000 penduduk
		7	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk
		8	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)
		9	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk
		10	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten
24	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	
25	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM	1	Angka Melek Huruf (%)
		2	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)
		3	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
		4	Angka Partisipasi Kasar
			Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A
			Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B
			Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C
		5	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk
			- Jenjang SD/Sederajat
			- Jenjang SMP/Sederajat
			- Jenjang SMA/Sederajat
		6	Angka Partisipasi Murni
			Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B
			Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang meliputi :

1. Program Pembangunan pada Misi I :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
- d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- e. Program Perencanaan Sosial Budaya
- f. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

- g. Program kerjasama informasi dengan mass media
- h. Program pengkajian kerjasama dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- i. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- j. Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
- k. Program kerjasama informasi dengan Mass Media
- l. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- m. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- n. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- o. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- p. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- q. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- r. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- s. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- t. Program Pengembangan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- u. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

2. Program Pembangunan pada Misi II :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- h. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- i. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- j. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan
- k. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- l. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- m. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- n. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- o. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- q. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- r. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
- s. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
- t. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan
- u. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- v. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- w. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- x. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- y. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- z. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- aa. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- bb. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- cc. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

- dd. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- ee. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- ff. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- gg. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- hh. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- ii. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- jj. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi
- kk. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- ll. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- mm. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- nn. Program Pengembangan Kemitraan
- oo. Program Pengelolaan Nilai Budaya
- pp. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- qq. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3. Program Pembangunan pada Misi III :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pembangunan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
- c. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- d. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- e. Program Pengendalian Banjir
- f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- g. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- j. Program Pembangunan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
- k. Program Pengembangan Perumahan

- l. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- m. Program DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
- n. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- p. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- q. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- r. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- s. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- t. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- u. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- v. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

4. Program Pembangunan pada Misi IV :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- d. Program Keluarga Berencana
- e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
- g. Program Pelayanan Kontrasepsi
- h. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- i. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- j. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

- k. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
- m. Program Peningkatan Sarana dan sarana Pelayanan KIE/Advokasi KB
- n. Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- o. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- p. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- q. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- r. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- s. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- t. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- u. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- v. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- w. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- x. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- y. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- z. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- aa. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- bb. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- cc. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
- dd. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- ee. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- ff. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

- gg. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- hh. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- ii. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)
- jj. Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- kk. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- ll. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- mm. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan janji Kepala Daerah untuk mewujudkan target kinerja dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki dan berdasarkan pada perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang periode tahun 2012–2017.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang
Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	1.	Persentase SDM perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan teknis perencanaan	75%
		2.	Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)	90%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	1. Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPD	100%
		2. Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Renstra OPD	100%
		3. Tingkat kesesuaian RKPD dengan Renja OPD	100%
3	Meningkatnya layanan dan informasi publik	1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	15
4	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah	1 Inovasi aplikasi dalam website milik pemerintah daerah	50
		2 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	1 LPPL
		3 Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25
5	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	4
		2 Jumlah satuan Linmas per desa	10
		3 Rasio poskamling per desa/ kelurahan	5
		4 Persentase demo yang tertangani	100%
6	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi	1 Jumlah LSM	115
7	Meningkatnya penanaman modal di daerah	1 Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	146,49
		2 Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500
		3 Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000
		4 Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	3.500
8	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor	1 Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,17
		2 Pencari kerja yang ditempatkan	50%
		3 Keselamatan dan perlindungan	45%
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	1 Revitalisasi pasar rakyat	25%
		2 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap	16,12%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
	bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional		PDRB (ADHB)	
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	16,71%
		4	Ekspor Bersih Perdagangan	71.997.875,47
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan	1	Pertumbuhan Industri (unit)	10,851
		2	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	26,05%
		3	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,50%
		4	Jumlah Unit usaha sentra industri	255
11	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian	1	Nilai tukar petani (%)	100,31
		2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	27
		3	Cakupan Bina Kelompok Peternak	40
		4	Ketersediaan Lahan Ternak	86,89
		5	Cakupan bina kelompok pengawas	360
		6	Tingkat Konsumsi ikan	35
		7	Tingkat Pengelolaan Konservasi	Dikelola secara minimum
		8	Cakupan bina kelompok Tangkap	65
		9	Cakupan bina kelompok Budidaya	70
		10	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklahsar)	45
12	Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan	1	Populasi Hewan ternak (ekor)	
			- Sapi Perah	165
			- Sapi Potong	20.000
			- Kerbau	1.550
			- Kambing	80.000
			- Domba	33.500

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		- Ayam buras	767.769
		- Ayam ras	24.000.000
		- Itik	113.000
2		Produksi perikanan Tangkap (ton)	40.000
3		Produksi perikanan Budidaya (ton)	3.888,86
4		Ketersediaan pangan utama (ton)	
		- Beras	181.951
		- Jagung	44.206
5		Produksi hasil ternak :	
		- Daging	9.800.000
		- Telur	7.100.000
		- Susu	120.000
6		Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	100
7		Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	100
8		Cadangan Pangan Daerah	5
9		Ketersediaan energi dan protein per kapita	
		- Energi per kapita	2.400
		- Protein per kapita	60
10		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	85
11		Stabilitas harga dan pasokan pangan	100
12		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100
13		Penanganan Daerah Rawan Pangan	62
14		Produktivitas Padi sawah	4,79
15		Produksi Padi	196.600
16		Produktivitas Jagung	6,496
17		Produksi Jagung	45.541

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
		18	Jumlah Kelompok Tani Binaan	885
13	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM	1	Persentase koperasi aktif (%)	74
		2	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	101.600
		3	Jumlah bank dan cabang	74
		4	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	7
		5	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,5-5,6
		6	Laju inflasi	5±1
		7	PDRB per kapita ADHK	4,89
		8	Indeks Gini	0,304
		9	Indeks Pembangunan Manusia	74,01
		10	Presentase Penduduk Miskin	11,66
14	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal	1	Kunjungan Wisata	444.635
		2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	12
		3	Obyek Wisata yang ditangani	5
		4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	2 milyar
		5	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	94
		6	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	10
15	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	95
		2	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) (>40 km/jam)	80
		3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	83,16
		4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	96,40%
		5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,22
		6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	36,21%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
		7	Lingkungan Pemukiman	24,28
16	Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur	1	Ketaatan terhadap RTRW, (%)	100
		2	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	5,73
17	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat	1	Rasio Rumah layak huni (%)	72
		2	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	55
		3	Rumah tangga pengguna air bersih	76,00%
		4	Lingkungan pemukiman kumuh	0,18
		5	Persentase pemohon sertifikat	91%
		6	Prona (Program Nasional) yang terlayani	600 bidang
18	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik	1	Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan	539
19	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan	1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	80
		2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	40
20	Terwujudnya penyelenggaraan KB / KS	1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	119.816
		2	Cakupan peserta KB aktif (%)	85
21	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi	1	Kepemilikan KTP el (%)	90
		2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	557
		3	Pengiriman Transmigran (KK)	5
		4	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun	15.888
22	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)	1,95
		2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	195.526
		3	Rasio KDRT	0%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
	olahraga	4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	200.674
		5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%
23	Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup (tahun)	71
		2	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100
		3	Kasus Kematian Ibu	16
		4	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	11,50
		5	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15,50
		6	Incident rate DBD per 100.000 penduduk	20
		7	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk	1
		8	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)	10,50%
		9	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk	76%
		10	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100%
24	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	7
25	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM	1	Angka Melek Huruf (%)	100
		2	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	7,2
		3	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	75
		4	Angka Partisipasi Kasar	
			Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A	105
			Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs /	95

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Paket B	
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C	55
5		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	
		- Jenjang SD/Sederajat	52
		- Jenjang SMP/Sederajat	20
		- Jenjang SMA/Sederajat	9,20
6		Angka Partisipasi Murni	
		Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	82,66
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C	50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome sehingga keberhasilan bukan ditentukan oleh kesuksesan dalam menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi oleh manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya.

Sikap akuntabel Pemerintah Kabupaten Batang tersebut diwujudkan dengan menyusun RPJMD periode 2012–2017 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. Rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan target kinerja yang akan dicapai. Untuk memperkuat komitmen berkinerja, Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun 2017 telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat baik/Sangat berhasil
>75% s/d 100%	Baik/Berhasil
55% s/d 75%	Cukup baik/Cukup berhasil
< 55%	Kurang baik/Kurang berhasil

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengetahui capaian kinerja nyata, terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran strategis yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing di representasikan oleh capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hasil pengukuran capaian indikator kinerja daerah pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Aspek	Capaian Kinerja
1.	Rata – rata capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat	88,15
2.	Rata – rata capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum	115,90
3.	Rata – rata capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Daerah	122,85
Rata – rata Capaian Indikator Kinerja Daerah		108,97

Secara kumulatif rata-rata Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2017 mencapai 108,97% atau kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Batang pada Tahun 2017 tergolong Sangat Baik/Sangat Berhasil.

Sedangkan gambaran keberhasilan ketercapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan
				2017	2016		
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	1. Persentase SDM perencana yang telah memperoleh pendidikan / pelatihan teknis perencanaan	75	100	-	133,3	-
		2. Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)	90%	100%	88,21%	111,11	13,37
						122,22	13,37
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	1. Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPD	100%	100%	-	100	-
		2. Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Renstra OPD	100%	100%	-	100	-
		3. Tingkat kesesuaian RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	-	100	-
						100	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan
					2017	2016		
3	Meningkatnya layanan dan informasi publik	1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	15	15	12	100	25,00
							100	25,00
4	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah	1	Inovasi aplikasi dalam website milik pemerintah daerah	50	50	-	100	-
		2	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	1 LPPL	1 LPPL	-	100	-
		3	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25	25	16	100	56,25
							100	-
5	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP (kali)	4	4	3	100	33
		2	Jumlah Linmas per desa	10	19	8,8	190	116
		3	Rasio pos kamling per desa / kelurahan	5	7,79	5,04	155,8	55
		4	Prosentase demo yang tertangani	100	100	100	100	0
							136,45	50,95
6	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat	1	Jumlah LSM	115	115	105	100	10

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan	
				2017	2016			
	dalam proses demokrasi							
						100	10	
7	Meningkatnya penanaman modal di daerah	1	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	146,49	421,09	530,39	287,45	-20,61
		2	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500	82	220	16,4	-62,73
		3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000	1150	2.147	115	-46,44
		4	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	3.500	2903	3.132	82,94	-7,31
						125,45	-34,27	
8	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor	1	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,17	2,31	4,56	180,52	97,40
		2	Pencari kerja yang ditempatkan	50%	29,22%	71,06%	58,44	-58,88
		3	Keselamatan dan perlindungan	45%	22%	50,55%	48,89	-56,48
						95,95	-5,99	
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional	1	Revitalisasi pasar rakyat	25%	25%	-	100	-
		2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	16,12%	12,97%	12,71%	80,46	2,05
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	16,71%	14,68%	14,02%	87,85	4,71
		4	Ekspor Bersih Perdagangan	71.997.875,47	15.405.503,27	53.905.236,66	21,40	-78,11
						72,43	-17,84	
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan	1	Pertumbuhan Industri (unit)	10,851	10,758	10,685	99	1
		2	Kontribusi sektor Perindustrian	26,05%	33,65%	33,43%	129	0,66

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan
					2017	2016		
	rakyat serta ramah terhadap lingkungan		terhadap PDRB ADHB (%)					
		3	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,50%	33,77%	32,80%	122,8	2,96
		4	Jumlah Unit usaha sentra industri	255	268	263	105	1,90
							114,05	1,55
1	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian	1	Nilai tukar petani (%)	100,31	100,4	100,4	100,09	0,00
1		2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	27	23,09	24	85,52	-3,79
		3	Cakupan Bina Kelompok Peternak	40	41	63	102,50	-34,92
		4	Ketersediaan Lahan Ternak	86,89	140,757	85,19	161,99	65,23
		5	Cakupan bina kelompok pengawas	360	0	300	0,00	-100,00
		6	Tingkat Konsumsi ikan	35	27,61	25,01	78,89	10,40
		7	Tingkat Pengelolaan Konservasi	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	100,00	100,00
		8	Cakupan bina kelompok Tangkap	65	35	54	53,85	-35,19
		9	Cakupan bina kelompok Budidaya	70	10	40	14,29	-75,00
		10	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklhasar)	45	30	11	66,67	172,73
							76,38	9,95

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan		
				2017	2016				
1 2	Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan	1	Populasi hewan ternak (ekor)						
			- Sapi perah	165	96	122	58,18	- 21,31	
			- Sapi potong	20.000	20.770	20.002	103,85	3,84	
			- Kerbau	1.550	1.403	1.518	90,52	- 7,58	
			- Kambing	80.000	80.590	80.090	100,74	0,62	
			- Domba	33.500	32.769	33.519	97,82	- 2,24	
			- Ayam buras	767.769	777.902	769.252	101,32	1,12	
			- Ayam ras	24.000.000	970.000	13.040.992	4,04	- 92,56	
			- Itik	113.000	113.679	121.673	100,60	- 6,57	
			2	Produksi perikanan tangkap (ton)	40.000	32.072	38.425	80,18	- 16,53
			3	Produksi perikanan budidaya (ton)	3.888,86	3.092	2.988	79,51	3,48
			4	Ketersediaan pangan utama (ton)					
				- Beras	181.951	125.272	135.930	68,85	22,42
				- Jagung	44.206	74.044	44.705	167,50	23,31
			5	Produksi hasil ternak					
				- Daging	9.800.000	1.354.320	10.058.982	13,82	-86,54
				- Telur	7.100.000	7.125.807	8.459.116	100,36	-15,76
				- Susu	120.000	87.500	101.510	72,92	-13,80
			6	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100	100	100	100	0
			7	Persentase harga realisasi	100	100	100	100	0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan	
				2017	2016			
			dan pasokan pangan komoditas pilihan					
		8	Cadangan pangan daerah	5	5	27	100,00	-81,48
		9	Ketersediaan energi dan protein per kapita					
			- Energi per kapita	2.400	2.836	2.913	118,17	-2,64
			- Protein per kapita	60,00	89,70	92,14	149,5	-2,65
		10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	85	84	85,3	98,82	-1,52
		11	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100	100	100	100	0
		12	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	0
		13	Penanganan Daerah Rawan Pangan	62	67	67	108,06	0
		14	Produktivitas padi sawah	4,79	4,862	5,108	101,50	-4,82
		15	Produksi padi	196.600	222.954	216.657	113,405	2,906
		16	Produktivitas jagung	6,496	7,867	7,25	121,11	8,51
		17	Produksi jagung	45.541	83.195	44.075	182,68	88,76
		18	Jumlah kelompok tani binaan	885	887	865	100,23	2,54
							97,71	-6,84
13	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM	1	Persentase koperasi aktif (%)	74	61,5	66	83,11	-6,82
		2	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	101.600	101.550	101365	99,95	0,18
		3	Jumlah bank dan cabang	74	65	63	87,84	3,17
		4	Jumlah perusahaan	7	3	3	42,86	0,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan
				2017	2016		
		asuransi dan cabang					
		5 Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,5-5,6	-	4,93	-	-
		6 Laju inflasi	5±1	-	2,24	-	-
		7 PDRB per kapita ADHK	4,89	-	16,6	-	-
		8 Indeks Gini	0,304	-	0,28	-	-
		9 Indeks Pembangunan Manusia	74,01	-	66,38	-	-
		10 Presentase Penduduk Miskin	11,66	-	11,04	-	-
						78,44	-0,87
14	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal	1 Kunjungan Wisata	444.635	521.105	541.272	117,20	-3,73
		2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	12	18	12	150	50
		3 Obyek Wisata yang ditangani	5	9	8	180	12,5
		4 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	2.000.000.000	2.404.864.000	1.852.810.200	120,24	29,80
		5 Jenis, kelas, dan jumlah restoran	94	96	92	102,13	4,35
		6 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	10	12	11	120	9,09
						131,59	17,00
15	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian	1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	95	60,98	46,98	64,19	29,80
		2 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) (>40 km/jam)	80	51,16	320,14	63,95	-84,02
		3 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi	83,16	46	8.719	55,32	-99,47

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan	
				2017	2016			
			Baik (%)					
		4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	96,40%	100%	93,52%	103,73	6,93
		5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,22	0,22	0,18	100	22,22
		6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	36,21%	26,83%	19,48%	74,096	37,731
		7	Lingkungan Pemukiman	24,28	20	20	82,37	0
							77,67	-12,40
16	Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur	1	Ketaatan terhadap RTRW, (%)	100	72,73	71,17	72,73	2,19
		2	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	5,73	15,35	3,7	267,89	314,86
							170,31	158,53
17	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat	1	Rasio Rumah layak huni (%)	72	75,27	89	104,54	-15,43
		2	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	55	73,04	55	132,8	32,8
		3	Rumah tangga pengguna air bersih	76,00%	77,10%	70,25%	101,45	9,75
		4	Lingkungan pemukiman kumuh	0,18	0,946	0,1	19	-89,43
		5	Persentase pemohon sertifikat terlayani	91%	85%	91%	93,41	-6,59

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan
					2017	2016		
		6	Prona (Program Nasional) yang terlayani	600	1700	-	283	0
							122,43	-11,48
18	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik	1	Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan	539	590	539	109,46	9,46
							109,46	9,46
19	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan	1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	80	29,48	8,62	36,85	242
		2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	40	29,27	8,64	73,175	239
							55,01	240,38
20	Terwujudnya penyelenggaraan KB / KS	1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	119.816	130.238	130.298	108,70	-0,05
		2	Cakupan peserta KB aktif (%)	85	82,53	80	97,09	3,16
							102,90	1,56
21	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi	1	Kepemilikan KTP el (%)	90	87	95	96,67	-8,42
		2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	557	556	529	99,82	5,10
		3	Pengiriman Transmigran (KK)	5	5	8	100,00	-37,50
		4	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun	15.888	91.346	54.928	574,94	66,30
							217,86	6,37
22	Meningkatnya pengembangan	1	Persentase partisipasi	1,95	1,21	1,73	62,05	-30,06

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan	
				2017	2016			
	dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	perempuan di lembaga pemerintah, (%)						
		2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	195.526	278818	135822	142,60	105,28
		3	Rasio KDRT	0	0,004	0,002	96,00	100
		4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	200.674	282.231	139.838	140,64	101,83
		5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100	0
						108,26	55,41	
2 3	Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup (tahun)	71	74,46	74,42	104,87	0,05
		2	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	0
		3	Kasus Kematian Ibu	16	16	16	100,00	0
		4	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	11,5	12,73	15,39	90,34	20,90
		5	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15,5	15,59	18,98	99,42	21,74
		6	Incident rate DBD per 100.000 penduduk	15,5	15,59	18,98	99,42	21,74
		7	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk	20	6,94	95,01	165,30	88,07
		8	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)	1	0,48	0,51	152,00	6,25
		9	Prevalensi Penderita TBC	10,50%	7,11%	6,92%	132,29	-2,67

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan
				2017	2016		
		BTA positif per 100.000 penduduk					
		10 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	76	106	95	71,70	-10,38
						102,56	10,31
24	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	7%	7%	6%	100	16,67
						100	16,67
25	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM	1 Angka Melek Huruf (%)	100	99,47	99,34	99,47	0,13
		2 Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	7,2	7,19	6,81	99,86	5,58
		3 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	75	80,39	76,99	107,19	4,42
		4 Angka Partisipasi Kasar					
		Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A	105	104,78	104,7	99,79	0,08
		Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B	95	95,49	95,36	100,52	0,14
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C	55	49,56	67,28	90,11	-26,34
		5 Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk					
		-Jenjang SD/Sederajat	52	67,39	39,98	129,60	68,56
		-Jenjang	20	26,21	15,95	131,05	64,33

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan / Penurunan
				2017	2016		
		SMP/Sederajat					
		-Jenjang SMA/Sederajat	9,2	11,98	11,69	130,22	2,48
	6	Angka Partisipasi Murni					
		Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95	94,52	94,06	99,49	0,49
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	82,66	80,85	80,69	97,81	0,20
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C	50	49,56	48,3	99,12	2,61
						107,02	10,22
	Rata-rata Capaian IKU					108,97	

Secara kumulatif rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2017 mencapai 108,97% atau ketercapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah pada Tahun 2017 tergolong Sangat Baik/Sangat Berhasil.

Adapun uraian keberhasilan atau hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, baik, bersih, transparan dan adil

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Meningkatnya profesionalitas aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas

Capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalitas aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas tersebut didukung oleh :

- a) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.
- b) Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase SDM perencana yang telah memperoleh pendidikan / pelatihan teknis perencanaan	75	100	-	133,3	-
2	Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)	90%	100%	88,21	111,11	13,37
Capaian Kinerja Sasaran (1)					122,22	13,37

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya profesionalitas aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas mencapai 122,22%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja. Dua indikator kinerja tersebut, telah melampaui target yang ditetapkan,

Jika dibandingkan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan. Dari 2 (dua) indikator, hanya satu indikator yang bisa dibandingkan dengan capaian indikator tahun

lalu yaitu Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program yang naik sebesar 13,37. Sedangkan 1 (satu) indikator yaitu Persentase SDM perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan teknis perencanaan tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena merupakan indikator baru sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang.

Sampai dengan akhir tahun 2017, capaian kinerja sasaran Meningkatnya profesionalitas aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas telah memenuhi target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Perencanaan dan Litbang terus mengupayakan peningkatan capaian kinerja antara lain dengan meningkatkan profesionalitas aparatur perencana melalui berbagai kegiatan bintek.

c) Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b) Program Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
- c) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- d) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPD	100%	100%	-	100	-
2	Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Renstra OPD	100%	100%	-	100	-
3	Tingkat kesesuaian RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	-	100	-
Capaian Kinerja Sasaran (2)					100	-

Dengan capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah mencapai 100%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik/Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja dan ketiga indikator kinerja tersebut telah sesuai target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran tersebut tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan ketiga indikator penunjangnya merupakan indikator baru.

Dengan tercapainya target kinerja sasaran di atas maka target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017 telah terpenuhi.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Perencanaan dan Litbang terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia guna mempertahankan dan terus meningkatkan terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah.

2. Tujuan mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan standar layanan yang baik, cepat dan transparan serta penguatan Inovasi Daerah

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

1) Meningkatnya layanan dan informasi publik

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya layanan dan informasi publik tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
- b) Program kerjasama informasi dan media masa
- c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- d) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	15	15	12	100	25
Capaian Kinerja Sasaran (1)					100	25

Dengan capaian kinerja sasaran layanan dan informasi publik mencapai 100%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik/Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari

capaian satu indikator kinerja yaitu Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran mengalami kenaikan sebesar 25%.

Sampai dengan tahun 2017 capaian sasaran Meningkatnya layanan dan informasi publik belum memenuhi target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan sarana prasarana serta kualitas dan kuantitas sumberdaya dibidang teknologi informasi.

2) Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah.

Capaian kinerja Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- b) Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
- c) Program kerjasama informasi dengan Mass Media
- d) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inovasi aplikasi dalam website milik pemerintah daerah	50	50	-	100	-
2	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	1 LPPL	1 LPPL	-	100	-
3	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25	25	16	100	56,25
Capaian Kinerja Sasaran (2)					100	56,25

Dengan capaian kinerja sasaran Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah mencapai 100%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik/Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja. Dan ketiga Indikator dimaksud telah mencapai target yang ditetapkan.

Dari 3 indikator, hanya satu indikator yang bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu, yaitu Peningkatan SDM pengelola kearsipan yang meningkat sebesar 56,25%.

Sedangkan dua indikator lainnya yaitu Inovasi aplikasi website milik pemerintah daerah merupakan indikator baru, sedangkan untuk indikator Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televise, meskipun merupakan indikator lama tetapi mempunyai satuan target yang berbeda dengan tahun lalu, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan.

Sampai dengan tahun 2017 capaian sasaran Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah belum memenuhi target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017.

Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan sarana prasarana serta kualitas dan kuantitas sumberdaya dibidang teknologi informasi dan peningkatan SDM bidang kearsipan melalui berbagai jenis Bintek.

3. Tujuan mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama.

Capaian kinerja sasaran Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- c) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- f) Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
- g) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- h) Program Pengembangan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP (kali)	4	4	3	100	33
2	Jumlah Linmas per desa	10	19	8,8	190	116
3	Rasio pos kamling per desa / kelurahan	5	7,79	5,04	155,8	55
4	Prosentase demo yang tertangani	100	100	100	100	0
Capaian Kinerja Sasaran (1)					136,45	50,95

Dengan capaian kinerja sasaran Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama mencapai 136,45%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 4 (empat) indikator kinerja. Keempat indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan dua diantaranya yaitu Jumlah Linmas per Desa dan Rasio pos kamling per desa/kelurahan melebihi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 50,95 %.

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja RPJMD Tahun 2012-2017, Capaian kinerja sasaran tersebut telah memenuhi target yang diharapkan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan upaya peningkatan, diantaranya adalah :

- Mengalokasikan dana untuk keperluan anggota Linmas dan pembangunan posko Siskamling.
- Meningkatkan pemantauan ketertiban masyarakat dan pemantauan wilayah;
- Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana guna memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum dengan mengusulkan Pembangunan Gedung dan Sarana Mobilitas Patrol Wilayah.

2) Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi tersebut didukung oleh Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah LSM	115	115	105	100	10
Capaian Kinerja Sasaran (2)					100	10

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi mencapai 100%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam Baik/Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian Jumlah LSM belum mencapai target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah LSM yang ada di kabupaten Batang.

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, capaian indikator kinerja Jumlah pembinaan politik daerah telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut dengan berbagai langkah antara lain :

- Melaksanakan pembinaan politik daerah kepada masyarakat
- Memberdayakan sumber daya, sarana prasarana maupun pemberdayaan personil secara maksimal dalam rangka meningkatkan peran partai politik dan ormas dalam proses demokrasi.

4. Tujuan Mengembangkan perekonomian daerah dan peningkatan investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

1) Meningkatnya penanaman modal di daerah

Capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal di daerah tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- c) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp.)	146,49	421,09	530,39	287,45	-20,61
2	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500	82	220	16,4	-62,73
3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000	1150	2.147	115	-46,44
4	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	3.500	2903	3.132	82,94	-7,31
Capaian Kinerja Sasaran (1)					125,45	-34,27

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanaman modal di daerah mencapai 125,45%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 4 (empat) indikator kinerja. Capaian 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, dan 2 (dua) indikator yaitu jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang dan Jumlah ijin usaha yang diterbitkan belum mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami penurunan.

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya penanaman modal di daerah secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dan akan terus diupayakan peningkatannya pada tahun mendatang.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanaman modal di daerah antara lain:

- Menambah pelayanan perijinan dari sistem manual (pemohon datang ke BPMPT untuk melakukan permohonan ijin) ke pelayanan perijinan berbasis IT/WEB.
- Menambah perangkat lunak dengan menambah sumber informasi baik mengenai seputar perijinan maupun informasi potensi / peluang investasi di Kabupaten Batang dengan komputer touch screen yang berada di area front office.
- Mengikutsertakan pegawai dalam Diklat PTSP di bidang Penanaman Modal dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan oleh BKPM.
- Mengikutsertakan pegawai dalam Diklat promosi potensi daerah oleh BKPM.

2) Meningkatnya penyerapan kerja di berbagai sektor.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyerapan kerja di berbagai sektor tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,17	2,31	4,56	180,52	97,40
2	Pencari kerja yang ditempatkan	50%	29,22 %	71,06 %	58,44	-58,88

3	Keselamatan dan perlindungan	45%	22%	50,55 %	48,89	-56,48
Capaian Kinerja Sasaran (2)					95,95	-5,99

Dengan capaian kinerja sasaran meningkatnya penyerapan kerja di berbagai sektor mencapai 95,95%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik / Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja. Dari tiga indikator tersebut, satu indikator telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Persentase Tingkat Pengangguran terbuka. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu Pencari Kerja yang ditempatkan dan Keselamatan dan perlindungan belum mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami sedikit penurunan.

Sampai dengan tahun 2017, capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyerapan kerja di berbagai sektor belum memenuhi target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017. Untuk itu Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyerapan kerja di berbagai sektor.

5. Tujuan pengembangan perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui

revitalisasi pasar tradisional tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- c) Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan
- d) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Revitalisasi pasar rakyat	25%	25%	-	100	-
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	16,12%	12,97 %	12,71 %	80,46	2,05
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	16,71%	14,68 %	14,02 %	87,85	4,71
4	Ekspor Bersih Perdagangan	71.997.875,47	15.405.503,27	53.905.236,66	21,40	-78,11
Capaian Kinerja Sasaran (1)					72,43	-17,84

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional mencapai 72,43%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Cukup Baik / Cukup Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 4 (empat) indikator kinerja. Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut,

capaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu Revitalisasi Pasar Rakyat telah memenuhi target, sedangkan 3 (tiga) indikator lain belum memenuhi target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami penurunan, dikarenakan berkurangnya ekspor bersih perdagangan yang menurun sampai 78,11%. Sedangkan untuk indikator Revitalisasi Pasar Rakyat, meskipun telah memenuhi target yang ditetapkan tetapi tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2016 karena merupakan indikator baru.

Sampai dengan akhir tahun 2017, capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional telah memenuhi target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017. Untuk itu Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyerapan kerja di berbagai sektor.

Dalam rangka terus meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Batang berupaya melakukan pembinaan kepada pedagang kecil maupun upaya revitalisasi pasar tradisional.

- 2) Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah

- d) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- e) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Industri (unit)	10,851	10,758	10,685	99	1
2	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	26,05%	33,65 %	33,43 %	129	0,66
3	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,50%	33,77 %	32,80 %	122,8	2,96
4	Jumlah Unit usaha sentra industri	255	268	263	105	1,90
Capaian Kinerja Sasaran (2)					114,05	1,55

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan mencapai 114,05%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat baik/Sangat berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 4 (empat) indikator kinerja. Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut 3 (tiga) diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) indikator yaitu Pertumbuhan industri baru mencapai 99% dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja

sasaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,55%. Kenaikan tertinggi diperoleh dari indikator Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB dengan capaian 129%

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, dari 7 (tujuh) indikator hanya 3 (tiga) indikator yang terdapat dalam RPJMD. Dua dari 3 indikator tersebut 2 indikator telah mencapai target sedangkan 1 indikator belum mencapai target yang ditetapkan.

6. Tujuan meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

- 1) Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
- b) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan
- e) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan

indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai tukar petani (%)	100,31	100,4	100,4	100,09	0,00
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	27	23,09	24	85,52	-3,79
3	Cakupan Bina Kelompok Peternak	40	41	63	102,50	-34,92
4	Ketersediaan Lahan Ternak	86,89	140,7 57	85,19	161,99	65,23
5	Cakupan bina kelompok pengawas	360	0	300	0,00	-100,00
6	Tingkat Konsumsi ikan	35	27,61	25,01	78,89	10,40
7	Tingkat Pengelolaan Konservasi	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	100,00	100,00
8	Cakupan bina kelompok Tangkap	65	35	54	53,85	-35,19
9	Cakupan bina kelompok Budidaya	70	10	40	14,29	-75,00
10	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklamsar)	45	30	11	66,67	172,73
Capaian Kinerja Sasaran (1)					76,38	9,95

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian mencapai 76,38%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik/

Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja.

Dari 10 indikator tersebut, baru 4 indikator telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, terutama Ketersediaan Lahan ternak.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran mengalami kenaikan sebesar 9,95%. Hal ini menunjukkan sektor pertanian bagi perekonomian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun ada satu indikator yang bisa diwujudkan karena tidak tersedia / didukung anggaran untuk mewujudkannya yaitu Cakupan bina kelompok pengawas.

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya untuk meningkatkan produksi dan kontribusi sektor pertanian di tahun mendatang.

- 2) Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- b) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- c) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- d) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

- e) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- f) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- g) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- h) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- i) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- j) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Populasi hewan ternak (ekor)					
	- Sapi perah	165	96	122	58,18	- 21,31
	- Sapi potong	20.000	20.770	20.002	103,85	3,84
	- Kerbau	1.550	1.403	1.518	90,52	- 7,58
	- Kambing	80.000	80.590	80.090	100,74	0,62
	- Domba	33.500	32.769	33.519	97,82	- 2,24
	- Ayam buras	767.769	777.902	769.252	101,32	1,12
	- Ayam ras	24.000.000	970.000	13.040.992	4,04	- 92,56
	- Itik	113.000	113.679	121.673	100,60	- 6,57
2	Produksi perikanan tangkap (ton)	40.000	32.072	38.425	80,18	- 16,53
3	Produksi perikanan budidaya (ton)	3.888,86	3.092	2.988	79,51	3,48
4	Ketersediaan pangan utama (ton)					
	- Beras	181.951	125.272	135.930	68,85	22,42
	- Jagung	44.206	74.044	44.705	167,50	23,31
5	Produksi hasil ternak					

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Daging	9.800.000	1.354.320	10.058.982	13,82	-86,54
	- Telur	7.100.000	7.125.807	8.459.116	100,36	-15,76
	- Susu	120.000	87.500	101.510	72,92	-13,80
6	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100	100	100	100	0
7	Persentase harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	100	100	100	100	0
8	Cadangan pangan daerah	5	5	27	100,00	-81,48
9	Ketersediaan energi dan protein per kapita					
	- Energi per kapita	2.400	2.836	2.913	118,17	-2,64
	- Protein per kapita	60,00	89,70	92,14	149,5	-2,65
10	Skor Pola Ppangan Harapan (PPH) daerah	85	84	85,3	98,82	-1,52
11	Stabilitas harga dan pasokan pangan	100	100	100	100	0
12	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	0
13	Penanganan Daerah Rawan Pangan	62	67	67	108,06	0
14	Produktivitas padi sawah	4,79	4,862	5,108	101,50	-4,82
15	Produksi padi	196.600	222.954	216.657	113,405	2,906
16	Produktivitas jagung	6,496	7,867	7,25	121,11	8,51
17	Produksi jagung	45.541	83.195	44.075	182,68	88,76
18	Jumlah kelompok tani binaan	885	887	865	100,23	2,54
Capaian Kinerja Sasaran (2)					97,71	-6,84

Dengan capaian kinerja sasaran Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan mencapai 97,71%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik/ Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja. Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami penurunan sebesar 6,84%. Penurunan ini lebih banyak karena adanya perubahan organisasi dan tata laksana dan adanya efisiensi anggaran.

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir RPJMD 2012-2017, capaian kinerja sasaran Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan telah mencapai target yang ditetapkan.

Guna meningkatkan capaian kinerja sasaran, Pemerintah Kabupaten Batang berupaya melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan pembinaan kepada petani, peternak dan nelayan guna peningkatan produksi melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan.
- Meningkatkan pemberdayaan petani melalui kelompok tani binaan.

7. Tujuan meningkatkan perekonomian berbasis masyarakat melalui koperasi dan sektor kebudayaan dan pariwisata.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

1) Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM tersebut didukung oleh Program sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- b) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- c) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- e) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- f) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi
- g) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase koperasi aktif (%)	74	61,5	66	83,11	-6,82
2	Usaha mikro dan kecil (unit)	101.600	101.550	101.365	99,95	0,18
3	Jumlah bank dan cabang	74	65	63	87,84	3,17
4	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	7	3	3	42,86	0,00
5	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,5-5,6	-	4,93	-	-
6	Laju inflasi	5±1	-	2,24	-	-
7	PDRB per kapita	4,89	-	16,6	-	-

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ADHK					
8	Indeks Gini	0,304	-	0,28	-	-
9	Indeks pembangunan manusia	74,01	-	66,38	-	-
10	Persentase penduduk miskin	11,66	-	11,04	-	-
Capaian Kinerja Sasaran (1)					78,44	-0,87

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM mencapai 78,44%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik / Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja. Namun sampai dengan Laporan ini disusun ada enam indikator belum bisa disajikan datanya.

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang datanya bisa disajikan tersebut, keempatnya belum memenuhi target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar (0,87%). Hal ini karena kondisi perkoperasian dan UMKM pada tahun 2017 relatif stagnan bahkan cenderung menurun.

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Tahun 2012-2017, maka capaian kinerja sasaran Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM belum memenuhi target yang ditentukan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang optimis bisa memenuhi target tersebut melalui strategi yang ditetapkan dalam RPJMD yang baru.

Guna meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut di atas

Pemerintah Kabupaten Batang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan semakin banyak koperasi-koperasi baru yang terbentuk.
- Mempermudah perijinan untuk membentuk koperasi-koperasi baru.

2) Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal. Capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c) Program Pengembangan Kemitraan
- d) Program Pengelolaan Nilai Budaya
- e) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- f) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kunjungan Wisata	444.63	521.1	541.2	117,20	-3,73
		5	05	72		
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	12	18	12	150	50
3	Obyek Wisata yang ditangani	5	9	8	180	12,5
4	Kontribusi sektor	2.000.000.	2.404.86	1.852.81	120,24	29,80

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pariwisata terhadap PDRB ADHB	000	4.000	0.200		
5	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	94	96	92	102,13	4,35
6	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	10	12	11	120	9,09
Capaian Kinerja Sasaran (2)					131,59	17,00

Dengan capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal mencapai 131,59%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 6 (enam) indikator kinerja. Keenam indikator tersebut telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 17%.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal telah memenuhi target capaian akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017. Meskipun jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan sebesar 3,73%.

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat baik, namun Pemerintah Kabupaten Batang masih mengupayakan pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal dengan meningkatkan promosi maupun pengembangan obyek wisata dan budaya.

8. Tujuan meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung

aktivitas perekonomian daerah.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b) Program Pembangunan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
- c) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- d) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- e) Program Pengendalian Banjir
- f) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- g) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- h) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	95	60,98	46,98	64,19	29,80
2	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) (>40 km/jam)	80	51,16	320,1 4	63,95	-84,02
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	83,16	46	8.719	55,32	-99,47

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	96,40%	100%	93,52 %	103,73	6,93
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,22	0,22	0,18	100	22,22
6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	36,21%	26,83 %	19,48 %	74,096	37,731
7	Lingkungan Pemukiman	24,28	20	20	82,37	0
Capaian Kinerja Sasaran (1)					77,67	-12,40

Dengan capaian kinerja sasaran Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian mencapai 77,67%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik/Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, hanya 1 indikator yang telah melampaui targetnya yaitu Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami penurunan terutama pada indikator

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik. Penurunan ini terutama kurang

seimbangnya perbandingan antara dana pemeliharaan dengan panjang jalan dan jaringan irigasi yang rusak. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan mengusulkan tambahan anggaran baik melalui APBD Kabupaten, Provinsi maupun DAK.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian telah memenuhi target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017.

Upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja diantaranya adalah:

- Melengkapi/membangun drainase pada tepi jalan Kabupaten.
- Memperbaiki/membuat geometri jalan yang kondisinya ekstrim sehingga pengguna jalan menjadi aman dan nyaman.
- Menambah anggaran untuk pemeliharaan jalan, agar kerusakan segera tertangani dan tidak bertambah parah.

2) Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b) Program Pembangunan Saluran/Drainase Gorong-Gorong

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ketaatan terhadap RTRW, (%)	100	72,73	71,17	72,73	2,19

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	5,73	15,35	3,7	267,89	314,86
Capaian Kinerja Sasaran (2)					170,31	158,53

Dengan capaian kinerja sasaran Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur mencapai 170,31%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari peningkatan capaian 2 (dua) indikator kinerja, khususnya Indikator Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha). Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan Ruang Terbuka Hijau ber HPL atau HGB menjadi meningkat, karena banyak lahan produktif yang diperuntukkan menjadi perumahan.

Sedangkan tidak tercapainya Ketaatan terhadap RTRW dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang khususnya tentang RTRW sehingga banyak yang melanggar dengan adanya alih fungsi lahan tersebut.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami peningkatan, dan secara umum telah memenuhi target capaian akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja diantaranya melalui berbagai kegiatan sosialisasi / memberikan informasi Tata Ruang khususnya peruntukan lahan kepada masyarakat.

9. Tujuan Pengembangan wilayah pemukiman penduduk dan

perumahan layak huni.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Perumahan
- b) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c) Program DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
- d) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- f) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Rumah layak huni (%)	72	75,27	89	104,54	-15,43
2	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	55	73,04	55	132,8	32,8
3	Rumah tangga pengguna air bersih	76,00%	77,10 %	70,25 %	101,45	9,75
4	Lingkungan pemukiman kumuh	0,18	0,946	0,1	19	-89,43
5	Persentase pemohon sertifikat terlayani	91%	85%	91%	93,41	-6,59

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2016	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Prona (Program Nasional) yang terlayani	600	1700	-	283	0
Capaian Kinerja Sasaran					122,43	-11,48

Dengan capaian kinerja sasaran Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat mencapai 122,43%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 6 (enam) indikator kinerja. Dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, 4 indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, 2 indikator belum mencapai target yaitu Lingkungan pemukiman kumuh dan persentase pemohon sertifikat yang terlayani.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tersebut memang mengalami penurunan, namun demikian sampai dengan tahun 2017, capaian sasaran strategis Tersedianya Perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012-2017.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan upaya untuk meningkatkan capaian sasaran melalui berbagai kegiatan khususnya alokasi dana untuk mengurangi lingkungan pemukiman kumuh, peningkatan rumah layak huni dan peningkatan pelayanan pemohon sertifikat.

10. Tujuan Pengembangan dan pemerataan sarana perhubungan dan transportasi publik.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik tersebut didukung oleh :

- a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- e) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- f) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan	539	590	539	109,46	9,46
Capaian Kinerja Sasaran					109,46	-

Dengan capaian kinerja sasaran Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik mencapai 109,46%, maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan.

Meskipun merupakan indikator baru, namun data tersebut bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang meningkat sebesar 9,46%.

Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain karena adanya penambahan jumlah angkutan, yaitu angkutan baru yang pertama kali kir dan angkutan kendaraan mutasi masuk ke kabupaten Batang. Disamping itu terdapat juga kendaraan daerah lain yang numpang uji di Kabupaten Batang.

Indikator kinerja Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik telah memenuhi target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang untuk lebih meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut adalah antara lain dengan terus meningkatkan sarana prasarana maupun pelayanan terkait dengan transportasi publik Kabupaten Batang.

11. Tujuan Peningkatan kualitas kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Tujuan tersebut mencakup 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui bantuan sosial dan pemberdayaan

Capaian kinerja sasaran Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui bantuan sosial dan pemberdayaan tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

- b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	80	29,48	8,62	36,85	242
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	40	29,27	8,64	73,175	239
Capaian Kinerja Sasaran (1)					55,01	240,38

Dengan capaian kinerja sasaran Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui bantuan sosial dan pemberdayaan mencapai 55,01%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Cukup Baik/Cukup Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja. Kedua indikator tersebut belum mencapai targetnya.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 240,38%.

Sampai akhir tahun 2017 capaian kinerja sasaran Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan belum memenuhi target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Hal ini disebabkan karena untuk penanganan PMKS ini memerlukan dana yang sangat besar mengingat jumlah PMKS di kabupaten Batang yang cukup banyak.

Guna meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran antara lain dengan melakukan berbagai pelatihan berusaha bagi keluarga miskin dan pelatihan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 2) Terwujudnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB KS).

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB KS) tersebut didukung oleh Program sebagai berikut :

- a) Program Keluarga Berencana
- b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- c) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
- d) Program Pelayanan Kontrasepsi
- e) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
- f) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- g) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
- h) Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan
- i) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
- j) Program Peningkatan Sarana dan rasarana Pelayanan KIE/Advokasi KB
- k) Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keluarga Pra dan Sejahtera I (KK)	119.816	130.238	130.298	108,70	-0,05
2	Cakupan peserta KB aktif (%)	85	82,53	80	97,09	3,16
Capaian Kinerja Sasaran (2)					102,90	1,56

Dengan capaian kinerja sasaran Terwujudnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB KS) mencapai 102,90%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja. Dari 2 (dua) indikator tersebut satu indikator telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan, sedangkan yang lainnya belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran Terwujudnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengalami peningkatan sebesar 1,56%. Terutama disebabkan karena peningkatan Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Batang.

Sampai dengan akhir tahun 2017 capaian kinerja Terwujudnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

- 3) Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- b) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepemilikan KTP el (%)	90	87	95	96,67	-8,42
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	557	556	529	99,82	5,10
3	Pengiriman Transmigran (KK)	5	5	8	100,00	-37,50
4	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun	15.888	91.346	54.928	574,94	66,30
Capaian Kinerja Sasaran (3)					217,86	6,37

Dengan capaian kinerja sasaran Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi mencapai 217,86%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 4 (empat) indikator kinerja. Dari 4 indikator tersebut 2 (dua) indikator telah mencapai / melampaui target yang ditetapkan bahkan untuk indikator Jumlah KTP-el yang diterbitkan mencapai 574,94%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,37%.

Sampai dengan akhir tahun 2017 capaian kinerja Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi telah mencapai target RPJMD 2012-2017.

12. Tujuan meningkatkan kualitas dan peran perempuan, kepemudaan, dan keolahragaan dalam aspek kehidupan masyarakat.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)	1,95	1,21	1,73	62,05	-30,06
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	195.526	278818	135822	142,60	105,28
3	Rasio KDRT	0	0,004	0,002	96,00	100
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	200.674	282.231	139.838	140,64	101,83
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100	0
Capaian Kinerja Sasaran					108,26	55,41

Dengan capaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga mencapai 108,26%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 5 (lima) indikator kinerja. Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut, 3 (tiga) indikator telah mencapai / melebihi targetnya, sedangkan 2 (dua) indikator yaitu Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Rasio KDRT belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah belum mencapai target karena banyak penawai perempuan yang pensiun, sementara rekrutmen pegawai perempuan lebih sedikit daripada pegawai laki-laki.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga tersebut mengalami kenaikan sebesar 55,41%.

Sementara itu jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, capaian indikator Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga telah memenuhi target yang ditetapkan.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan upaya untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.

13. Tujuan Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
- j) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- k) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- l) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- m) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- n) Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- o) Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka usia harapan hidup (tahun)	71	74,46	74,42	104,87	0,05
2	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	0
3	Kasus Kematian Ibu	16	16	16	100,00	0
4	Angka kematian Bayi 1000 kelahiran hidup	11,5	12,73	15,39	90,34	20,90
5	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15,5	15,59	18,98	99,42	21,74

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Incident rate DBD per 100.000 penduduk	20	6,94	95,01	165,30	88,07
7	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk	1	0,48	0,51	152,00	6,25
8	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)	10,50%	7,11%	6,92%	132,29	-2,67
9	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk	76	106	95	71,70	-10,38
10	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100%	100%	100%	100	0,00
Capaian Kinerja Sasaran					102,56	10,31

Dengan capaian kinerja sasaran Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat mencapai 102,56%, maka capaian tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil.

Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut, ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah memenuhi/melebihi targetnya sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Indikator yang belum tercapai adalah :

- Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, disebabkan karena masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronis sehingga banyak bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), masih adanya bayi lahir tidak dikehendaki dan belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas.
- Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, disebabkan karena masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronis sehingga banyak bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas dan belum optimalnya pemberian PMT Pemulihan terhadap balita gizi buruk (pemantauan terhadap balita gizi buruk dalam pemberian PMT).
- Prevalensi TB Paru BTA+ per 100.000 penduduk, disebabkan karena terbatasnya tenaga analis di Puskesmas (dari 21 Puskesmas hanya 10 Puskesmas yang mempunyai tenaga analis kesehatan), kepatuhan pasien untuk meminum obat secara rutin masih kurang sehingga ada penderita yang drop out (tidak melanjutkan pengobatan), lingkungan permukiman yang kurang baik (lembab) sehingga mudah menjadi transmisi penularan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami peningkatan sebesar (10,31)%.

Sementara itu jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, dari 10 indikator terdapat 7 indikator yang sudah mencapai target yaitu Angka Usia Harapan Hidup, Cakupan Desa Siaga Aktif, Angka Kematian Ibu, Incident Rate DBD, Prevalensi penderita kusta, Prevalensi kekurangan gizi dan Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1. Sementara 3 indikator lainnya yaitu Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup dan Prevalensi TB paru dan BTA+ per 100,000 penduduk belum mencapai target RPJMD.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan antara lain :

- Meningkatkan penyuluhan kepada ibu-ibu bayi melalui pembentukan ibu;
- Melakukan deteksi dini pada kesehatan bayi;
- Melakukan sweeping imunisasi dasar lengkap bagi bayi yang drop out terhadap pemberian imunisasi;
- Pemberian PMT pada ibu hamil sehingga mengurangi resiko bayi BBLR;
- Penerapan dan pengembangan program Manajemen Terpadu Balita Sakit;
- Mempersiapkan kesehatan calon ibu dengan pemberian tablet Fe pada remaja putri (anak SLTP/SLTA);
- Anjuran pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bln ;
- Pemberian MP ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas laboratorium di Puskesmas untuk pemeriksaan dan pembacaan slide suspek TB dengan mengangkat tenaga BLUD analis di Puskesmas dan mengadakan Bimtek tenaga analis secara bertahap;
- Melakukan pendampingan pengobatan penderita dengan menunjuk keluarga terdekat sebagai Pendamping Minum Obat (PMO) agar penderita tidak drop out dalam pengobatan; serta
- Melakukan promosi kesehatan melalui berbagai macam media tentang penyakit TB Paru.

14. Tujuan Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Capaian kinerja sasaran Pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat tersebut didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	7%	7%	6%	100	16,67
Capaian Kinerja Sasaran (1)					100,00	16,67

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mencapai 100,00%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik/Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator dan telah mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 16,67%.

Namun jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, capaian kinerja sasaran

Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan penyempurnaan capaian indikator kinerja, diantaranya melalui fasilitasi PKK dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender (P2MBG).

15. Tujuan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan standar layanan prima.

Tujuan tersebut mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM tersebut didukung oleh program sebagai berikut :

- a) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- b) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- c) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Melek Huruf (%)	100	99,47	99,34	99,47	0,13
2	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	7,2	7,19	6,81	99,86	5,58
3	Angka Partisipasi	75	80,39	76,99	107,19	4,42

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pendidikan Anak Usia Dini					
4	Angka Partisipasi Kasar					
5	Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A	105	104,78	104,7	99,79	0,08
6	Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B	95	95,49	95,36	100,52	0,14
7	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C	55	49,56	67,28	90,11	-26,34
8	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk					
	- Jenjang SD/Sederajat	52	67,39	39,98	129,60	68,56
	- Jenjang SMP/Sederajat	20	26,21	15,95	131,05	64,33
	- Jenjang SMA/Sederajat	9,2	11,98	11,69	130,22	2,48
9	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95	94,52	94,06	99,49	0,49
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	82,66	80,85	80,69	97,81	0,20
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C	50	49,56	48,3	99,12	2,61

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Angka Melek Huruf (%)	100	99,47	99,34	99,47	0,13
	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	7,2	7,19	6,81	99,86	5,58
10	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	75	80,39	76,99	107,19	4,42
11	Angka Partisipasi Kasar					
	Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A	105	104,78	104,7	99,79	0,08
	Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B	95	95,49	95,36	100,52	0,14
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C	55	49,56	67,28	90,11	-26,34
12	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk					
	- Jenjang SD/ Sederajat	52	67,39	39,98	129,60	68,56
	- Jenjang SMP/ Sederajat	20	26,21	15,95	131,05	64,33
	- Jenjang SMA/ Sederajat	9,2	11,98	11,69	130,22	2,48
13	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95	94,52	94,06	99,49	0,49
	Angka Partisipasi	82,66	80,85	80,69	97,81	0,20

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Murni SMP/ MTs/ Paket B					
	Angka Partisipasi Murni SMA/ SMK/ MA/ Paket C	50	49,56	48,3	99,12	2,61
Capaian Kinerja Sasaran					107,02	10,22

Dengan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM mencapai 107,02%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,22%.

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RPJMD Tahun 2012-2017, capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Upaya yang ditempuh antara lain adalah mengoptimalkan kinerja sumberdaya aparatur dan menyusun strategi dan terobosan untuk mewujudkan capaian kinerja yang diharapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Gambaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.356.311.813,00	219.815.869.111,01	100,21
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.369.245.629.005,00	1.344.223.712.375,00	98,17
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	2.123.880.132,00	-
	Jumlah Pendapatan	1.588.601.940.818,00	1.566.163.461.618,01	98,59
II	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	1.157.562.246.423,00	1.083.416.673.279,96	93,59
2	BELANJA MODAL	194.918.674.732,00	163.667.905.285,00	83,97
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja	1.354.480.921.155,00	1.247.084.578.564,96	92,07
4	TRANSFER	317.719.152.716,00	316.097.142.816,00	99,49
	Surplus/Defisit	(83.598.133.053,00)	2.981.740.237,05	(3,57)
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	PENERIMAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	93.695.845.353,00	103.695.845.353,96	110,67
2	PENGELUARAN			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.097.712.300,00	10.000.000.000,00	99,03
	Pembiayaan Netto	83.598.133.053,00	93.695.845.353,96	112,08
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	-	96.677.585.591,01	0,00

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagai berikut:

- Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 1.588.601.940.818,00 dan dapat direalisasikan Rp. 1.566.163.461.618,01 atau 98,59%.
- Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah Perubahan sebesar Rp. 1.354.480.921.155,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.247.084.578.564,96 atau 92,07%.
- Transfer direncanakan sebesar Rp. 317.719.152.716,00 dan realisasinya sebesar Rp. 316.097.142.816,00 atau 99,49 %.
- Sementara Pembiayaan neto Rp. 83.598.133.053,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 93.695.845.353,96 atau 112,08%.
- Terdapat SILPA sebesar Rp. 96.677.585.591,01.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Batang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Batang menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Adapun simpulan atas hasil pengukuran kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2017 mencapai nilai 108,97 sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 masuk dalam kategori Sangat *Baik/Sangat Berhasil*.
2. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur. Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW dan Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Untuk indikator kedua ini telah melampaui target yang ditetapkan.

3. Capaian kinerja terendah ada pada sasaran Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan, karena dari dua indikator yaitu Penanganan penyandang masalah kesejahteraan dan PMKS memperoleh bantuan sosial yang belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terlalu kompleksnya permasalahan di bidang Kesejahteraan Sosial. Dari sekitar 250ribu penyandang masalah kesejahteraan sosial, baru sekitar 22ribu bisa ditangani, itupun dengan menggunakan dana APBN.
4. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kerjanya kurang optimal.
5. Kurang seimbangannya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional.
6. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
7. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Terhadap permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Batang antara lain :

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
3. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
4. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

LAMPIRAN



BUPATI BATANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIHAJI, S.Ag, M.Pd

Jabatan : BUPATI BATANG

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batang, Agustus 2017

BUPATI BATANG,

WIHAJI, S.Ag, M.Pd.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	1. Persentase SDM perencana yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan teknis perencanaan	75%
		2. Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)	90%
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	1. Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPD	100%
		2. Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Renstra OPD	100%
		3. Tingkat kesesuaian RKPD dengan Renja OPD	100%
3	Meningkatnya layanan dan informasi publik	1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	15
4	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah	1. Inovasi aplikasi dalam website milik pemerintah daerah	50
		2. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	1 LPPL
		3. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25
5	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	4
		2. Jumlah satuan Linmas per desa	10
		3. Rasio poskamling per desa/ kelurahan	5
		4. Persentase demo yang tertangani	100%
6	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi	1. Jumlah LSM	115

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
	masyarakat dalam proses demokrasi			
7	Meningkatnya penanaman modal di daerah	1	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	146,49
		2	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500
		3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000
		4	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	3.500
8	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor	1	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,17
		2	Pencari kerja yang ditempatkan	50%
		3	Keselamatan dan perlindungan	45%
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional	1	Revitalisasi pasar rakyat	25%
		2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	16,12%
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	16,71%
		4	Ekspor Bersih Perdagangan	71.997.875,47
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan	1	Pertumbuhan Industri (unit)	10,851
		2	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	26,05%
		3	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,50%
		4	Jumlah Unit usaha sentra industri	255
11	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian	1	Nilai tukar petani (%)	100,31
		2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	27
		3	Cakupan Bina Kelompok Peternak	40
		4	Ketersediaan Lahan Ternak	86,89
		5	Cakupan bina kelompok pengawas	360
		6	Tingkat Konsumsi ikan	35

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		7 Tingkat Pengelolaan Konservasi	Dikelola secara minimum
		8 Cakupan bina kelompok Tangkap	65
		9 Cakupan bina kelompok Budidaya	70
		10 Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklahsar)	45
12	Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan	1 Populasi Hewan ternak (ekor)	
		- Sapi Perah	165
		- Sapi Potong	20.000
		- Kerbau	1.550
		- Kambing	80.000
		- Domba	33.500
		- Ayam buras	767.769
		- Ayam ras	24.000.000
		- Itik	113.000
		2 Produksi perikanan Tangkap (ton)	40.000
		3 Produksi perikanan Budidaya (ton)	3.888,86
		4 Ketersediaan pangan utama (ton)	
		- Beras	181.951
		- Jagung	44.206
		5 Produksi hasil ternak :	
		- Daging	9.800.000
		- Telur	7.100.000
		- Susu	120.000
		6 Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	100
		7 Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		8 Cadangan Pangan Daerah	5
		9 Ketersediaan energi dan protein per kapita	
		- Energi per kapita	2.400
		- Protein per kapita	60
		10 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	85
		11 Stabilitas harga dan pasokan pangan	100
		12 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100
		13 Penanganan Daerah Rawan Pangan	62
		14 Produktivitas Padi sawah	4,79
		15 Produksi Padi	196.600
		16 Produktivitas Jagung	6,496
		17 Produksi Jagung	45.541
		18 Jumlah Kelompok Tani Binaan	885
13	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM	1 Persentase koperasi aktif (%)	74
		2 Usaha Mikro dan Kecil (unit)	101.600
		3 Jumlah bank dan cabang	74
		4 Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	7
		5 Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,5-5,6
		6 Laju inflasi	5±1
		7 PDRB per kapita ADHK	4,89
		8 Indeks Gini	0,304
		9 Indeks Pembangunan Manusia	74,01
		10 Presentase Penduduk Miskin	11,66
14		1 Kunjungan Wisata	444.635

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal	2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	12
		3	Obyek Wisata yang ditangani	5
		4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	2 milyar
		5	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	94
		6	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	10
15	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	95
		2	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) (>40 km/jam)	80
		3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	83,16
		4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	96,40%
		5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,22
		6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	36,21%
		7	Lingkungan Pemukiman	24,28
16	Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur	1	Ketaatan terhadap RTRW, (%)	100
		2	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	5,73
17	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat	1	Rasio Rumah layak huni (%)	72
		2	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	55
		3	Rumah tangga pengguna air bersih	76,00%
		4	Lingkungan pemukiman kumuh	0,18

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
		5	Persentase pemohon sertifikat	91%
		6	Prona (Program Nasional) yang terlayani	600 bidang
18	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik	1	Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan	539
19	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan	1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	80
		2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	40
20	Terwujudnya penyelenggaraan KB / KS	1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	119.816
		2	Cakupan peserta KB aktif (%)	85
21	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi	1	Kepemilikan KTP el (%)	90
		2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	557
		3	Pengiriman Transmigran (KK)	5
		4	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun	15.888
22	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)	1,95
		2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	195.526
		3	Rasio KDRT	0%
		4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	200.674
		5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%
23	Terwujudnya jaminan penyelenggaraan	1	Angka usia harapan hidup (tahun)	71
		2	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target		
	kesehatan masyarakat	3	Kasus Kematian Ibu	16		
		4	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	11,50		
		5	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15,50		
		6	Incident rate DBD per 100.000 penduduk	20		
		7	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk	1		
		8	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)	10,50%		
		9	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk	76%		
		10	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100%		
		24	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	7
		25	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM	1	Angka Melek Huruf (%)	100
2	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)			7,2		
3	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini			75		
4	Angka Partisipasi Kasar					
	Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A			105		
	Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B			95		
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C			55		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
		5	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	
			- Jenjang SD/Sederajat	52
			- Jenjang SMP/Sederajat	20
			- Jenjang SMA/Sederajat	9,20
		6	Angka Partisipasi Murni	
			Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	82,66
			Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C	50

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 62.963.125.579,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 54.445.952.289,00
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 3.600.000,00
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 2.402.174.900,00
5	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 585.600.000,00
6	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rp. 38.942.250,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 5.734.703.840,00
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 9.335.598.800,00
9	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp. 65.000.000,00
10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 1.800.000.000,00
11	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Rp. 25.000.000,00
12	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 26.500.000.000,00
13	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 250.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
14	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan	Rp. 448.500.000,00
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 2.748.996.000,00
16	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 2.716.600.000,00
17	Program pengembangan data/informasi	Rp. 1.072.438.100,00
18	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 243.000.000,00
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.110.155.000,00
20	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 1.538.590.500,00
21	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Rp. 125.000.000,00
22	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 22.060.789.500,00
23	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 1.490.387.000,00
24	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 961.773.900,00
25	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 939.400.000,00
26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 211.665.900,00
27	Program Keluarga Berencana	Rp. 303.000.000,00
28	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Rp. 15.690.744.000,00
29	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Rp. 165.000.000,00
30	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp. 244.845.000,00
31	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp. 313.333.000,00
32	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp. 5.566.000.000,00
33	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp. 325.000.000,00
34	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 537.300.000,00
35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp. 443.400.000,00
36	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 316.932.950,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
37	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 150.499.900,00
38	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 1.643.653.500,00
39	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp. 5.250.931.050,00
40	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rp. 587.105.000,00
41	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 2.520.615.500,00
42	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rp. 830.400.000,00
43	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 15.898.506.000,00
44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 64.647.286.600,00
45	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rp. 745.000.000,00
46	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 75.000.000,00
47	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Rp. 180.000.000,00
48	Program Pendidikan Menengah	Rp. 325.000.000,00
49	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 94.294.000,00
50	Program pengembangan Kemitraan	Rp. 1.014.400.000,00
51	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 214.150.000,00
52	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 290.100.000,00
53	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 10.109.594.483,00
54	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 300.000.000,00
55	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 71.000.000,00
56	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp. 1.129.579.024,00
57	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp. 334.000.000,00
58	Program penyelesaian permasalahan pertanahan	Rp. 66.922.000,00
59	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 40.000.000,00
60	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 389.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
61	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 624.868.000,00
62	Program pelayanan kontrasepsi	Rp. 250.000.000,00
63	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp. 4.000.000.000,00
64	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Rp. 61.325.000,00
65	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 205.000.000,00
66	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp. 75.000.000,00
67	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 485.000.000,00
68	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp. 495.000.000,00
69	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 44.999.900,00
70	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 1.415.545.000,00
71	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 416.345.000,00
72	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 36.899.061.000,00
73	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 31.100.000,00
74	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 559.335.500,00
75	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp. 1.400.000.000,00
76	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp. 880.174.900,00
77	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp. 390.500.000,00
78	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 470.040.000,00
79	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 40.000.000,00
80	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp. 1.036.527.000,00
81	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp. 1.064.795.000,00
82	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp. 438.808.000,00
83	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp. 100.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
84	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.179.026.500,00
85	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp. 225.000.000,00
86	Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya	Rp. 225.000.000,00
87	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Rp. 547.534.500,00
88	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp. 306.948.620,00
89	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 7.844.850.000,00
90	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Rp. 104.700.000,00
91	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.882.550.000,00
92	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Rp. 164.850.000,00
93	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Rp. 80.652.000,00
94	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 428.035.000,00
95	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Rp. 27.000.000,00
96	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp. 233.000.000,00
97	Program pendidikan politik masyarakat	Rp. 40.000.000,00
98	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 513.229.200,00
99	Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	Rp. 724.360.000,00
100	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 579.815.100,00
101	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1.825.000.000,00
102	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp. 200.000.000,00
103	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 125.000.000,00
104	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 2.476.351.900,00
105	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 488.900.000,00
106	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 482.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
107	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 705.000.000,00
108	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp. 143.000.000,00
109	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 2.370.800.000,00
110	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Rp. 11.995.000,00
111	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp. 2.660.310.000,00
112	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp. 337.532.000,00
113	Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 30.000.000,00
114	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp. 200.000.000,00
115	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp. 350.000.000,00
116	Program Penataan struktur industri	Rp. 650.000.000,00
117	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 79.996.000,00
118	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Rp. 10.000.000,00
119	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp. 380.000.000,00
120	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp. 2.646.205.000,00
121	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp. 474.851.000,00
122	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.057.935.000,00
123	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 254.800.000,00
124	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp. 105.000.000,00
125	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp. 1.285.000.000,00
126	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 22.878.325.000,00
127	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp. 200.000.000,00
128	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Rp. 60.000.000,00
129	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp. 109.997.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
130	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp. 7.281.338.000,00
131	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Rp. 50.000.000,00
132	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp. 1.512.647.000,00
133	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp. 55.000.000,00
134	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.207.278.900,00
135	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 37.276.866.000,00
136	Program pengelolaan areal pemakaman	Rp. 323.500.000,00
137	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan	Rp. 855.300.000,00
138	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 44.000.000,00
139	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 100.000.000,00
140	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp. 23.262.152.000,00
141	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 1.369.183.000,00
142	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Rp. 1.086.000.000,00
143	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 8.345.100.000,00
144	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 37.000.000,00
145	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 1.115.330.000,00
146	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 400.000.000,00
147	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp. 90.465.000,00
148	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 813.168.000,00
149	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rp. 191.000.000,00
150	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 144.940.000,00
151	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp. 46.155.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
152	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Rp. 1.691.000.000,00
153	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 1.730.000.000,00
154	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 13.000.000,00
155	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp. 1.604.114.000,00
156	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 1.480.325.000,00
157	Program kerjasama informasi dengan mas media	Rp. 892.264.400,00
158	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp. 270.000.000,00
159	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 4.968.000.000,00
160	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 94.000.000,00
161	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 295.725.000,00
162	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 164.297.500,00
163	Program Pengendalian Banjir	Rp. 94.000.000,00
164	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 332.950.000,00
165	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 478.650.000,00
166	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 120.000.000,00
167	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Rp. 980.525.000,00
168	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp. 1.240.000.000,00
169	Program Peningkatan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial	Rp. 27.700.000,00
170	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp. 577.700.000,00
171	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 50.000.000,00
172	Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)	Rp. 5.000.000.000,00
173	Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)	Rp. 101.000.000.000,00
174	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Rp. 275.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
175	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rp. 551.485.000,00
176	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 760.424.000,00
177	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah	Rp. 27.700.000,00


 BUPATI BATANG,

 H. WAHJI, S.Ag, M.Pd.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan adil	1. Jumlah jaringan komunikasi	70
		2. Website pemerintah daerah	25
		3. Pengelolaan arsip secara baku	60
		4. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3
2.	Peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat	1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4
		2. Kegiatan pembinaan politik daerah	3
3.	Transparansi informasi pembangunan	1. Dokumen "Kabupaten Dalam Angka"	Tersedia
		2. Dokumen "PDRB Kabupaten"	Tersedia
		3. Jumlah Perpustakaan	1
		4. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	250.000
		5. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	52.000
		6. Opini BKP terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		7. Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti	90 %
4.	SOTK yang efektif dan efisien	1. Hasil Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	B
5.	Terwujudnya masyarakat batang yang rukun, bersatu, damai dan sejahtera	1. Angka kriminalitas yang tertangani	253
		2. Jumlah linmas per jumlah 10.000	7.000
		3. Rasio pos kamling per jumlah desa/ kelurahan	2.100
6.	Pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1. Pertumbuhan PDRB	7,24
		2. PDRB per kapita	11.137.389

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1.	Tersedianya dokumen perencanaan perencanaan RPJP yang ditetapkan dengan Perda	Tersedia
		2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Tersedia
		3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Tersedia
		4.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100 %
8.	Perekonomian daerah dan meningkatnya pendapatan masyarakat	1.	Jumlah bank dan cabang	44
		2.	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	3
		3.	Jenis, kelas dan jumlah restoran	95
		4.	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel	20
		5.	Jumlah objek wisata yang dikelola pihak swasta	7
9.	Kemudahan proses investasi dan usaha	1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	500 perusahaan
		2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4.000 milyar
		3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	6,97 milyar
		4.	Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar Rupiah)	146,49 milyar
		5.	Jumlah perijinan yang dikeluarkan	3.500 ijin
10.	Revitalisasi pasar tradisional sehingga memiliki daya saing terhadap pasar modern	1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB (%)	16,12 %
		2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	16,71 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
11.	Meningkatnya industri berbahan baku lokal dan padat karya	1.	Rasio daya serap tenaga kerja	1.000 orang
12.	Pengelolaan produksi bahan baku lokal menjadi barang jadi	1.	Jumlah unit usaha serta industri (unit)	255
		2.	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	26,05 %
		3.	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHK (%)	27,50 %
13.	Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat	1.	Pesentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %
		2.	Persentase harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	100 %
14.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi, usaha kecil dan menengah	1.	Persentase koperasi aktif	74 %
		2.	Usaha Mikro dan Kecil	101,5
15.	Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan UKM	1.	Jumlah IKM (unit)	10.851
16.	Terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan	1.	Masyarakat yang memperoleh ketrampilan dan kewira usahaan	1.200 orang
17.	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan, produk perkebunan, dan hasil hutan	1.	Produktivitas padi sawah (ton/Ha)	4,793
		2.	Produksi padi (ton)	196.600
		3.	Produktivitas jagung (ton/Ha)	6,496
		4.	Produksi jagung (ton)	45.541
		5.	Nilai tukar petani	100,31 %
		6.	Cadangan pangan daerah (ton)	46ton GKG
18.	Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun	1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	27,01
		2.	Jumlah Kelompok Tani Binaan	1.200

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		3.	Populasi hewan ternak	
		-	Sapi perah	165
		-	Sapi potong	20.000
		-	Kerbau	1.550
		-	Kambing	80.000
		-	Domba	33.500
		-	Ayam buras	767.769
		-	Ayam ras	24.000.000
		-	Itik	113.000
		4.	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	69
		5.	Ketersediaan Lahan Ternak (Ha)	86,89
		6.	Penyakit ternak yang tertangani	
		-	Jumlah ternak yang disuntik	775
-	Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)	3,05		
7.	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB/ADHB	4,46 %		
8.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHB	0,66 %		
19.	Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	1.	Ketersediaan pangan utama	
		-	Padi	181,951 ton
		-	Jagung	44,206 ton
		2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita	
		-	Energi per kapita	2.200 kkal/kap/hr

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		- Protein per kapita	95 gr/kap/hr
		3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	90
		4. Produksi hasil ternak	
		- Daging (kg)	9.800.000
		- Telur (kg)	7.100.000
		- Susu (liter)	120.000
20.	Meningkatnya ketahanan pangan produk perikanan	1. Produksi perikanan tangkap (ton)	35.000
		2. Produksi perikanan budidaya (ton)	3.000
21.	Meningkatnya jumlah wisatawan	1. Tingkat kunjungan wisatawan	600.000
		2. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	1.250.000. 000
22.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas objek wisata	1. Jumlah objek wisata yang ditangani	8
		2. Daya dukung kelompok sadar wisata (kelompok)	20
23.	Pengembangan dan pelestarian budaya lokal	1. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	360
24.	Meningkatnya jumlah pelaku industri kepariwisataan	1. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1
		2. Jumlah grup kesenian	600
		3. Jumlah usaha pariwisata	120
25.	Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah	1. Cakupan bina kelompok tangkap (kelompok)	57
		2. Cakupan bina kelompok budidaya (kelompok)	60
		3. Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar perikanan (poklamsar)	50
		4. Tingkat pengelolaan konservasi	Dikelola secara minimum
26.	Pemenuhan gizi masyarakat	1. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th)	30

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
27.	Pembangunan infrastruktur pedesaan	1.	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	19.287 Ha
		2.	Panjang jalan desa dalam kondisi baik	396 km
28.	Pembangunan, rehabilitasi jalan dan jembatan	1.	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	373,5 km
29.	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.	Ketaatan terhadap RTRW	100 %
		2.	Luas wilayah produktif	88,92
		3.	Luas wilayah industri	1,67
		4.	Luas wilayah banjir	0,10
		5.	Luas wilayah kekeringan	17,03
		6.	Luas wilayah perkotaan	16,19
30.	Peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, drainase, dan gorong-gorong	1.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	36,21
31.	Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	53 %
		2.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,15
		3.	Rasio rumah layak huni	0,22
		4.	Lingkungan pemukiman	24,28
		5.	Persentase penanganan sampah	26,51
		6.	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit)	134
		7.	Jumlah daya tampung TPS (m ²)	146,31
		8.	Rasio TPS per penduduk	0,15
		9.	Cakupan tempat2 umum yang memenuhi syarat kesehatan	65 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		10	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	8 %
		11	Kerusakan kawasan hutan	12,20 %
		12	Menurunnya ekosistem pesisir dan laut yang rusak	20.000 tanaman
		13	Menurunnya kawasan lingkungan yang tandus	60.000 tanaman
32.	Penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung	1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	5,73
		2.	Ketaatan terhadap RTRW	100 %
		3.	Jumlah pemohon sertifikat	1.900
		4.	Prona (Program Nasional)	2.000
33.	Perlindungan lahan pertanian abadi	1.	Persentase penggunaan lahan per tahun	99,99
34.	Pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	1.	Rumah tangga pengguna air bersih	76 %
		2.	Rumah tangga pengguna listrik	95,74 %
		3.	Rumah tangga bersanitasi	55 %
		4.	Lingkungan pemukiman kumuh	0,55
		5.	Rumah layak huni	93
35.	Pemerataan dan keterjangkauan transportasi publik	1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	10.019.321
		2.	Rasio ijin trayek	0,65
		3.	Jumlah uji kir angkutan umum	1.070
		4.	1. Pelabuhan	
			a. Pelabuhan laut	1
			b. Pelabuhan lokal	0
			2. Terminal	
			a. Type B	0

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		b. Type C	3
		5. Angkutan darat	4.000
		6. Kepemilikan KIR angkutan umum	535
		7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	65 menit
		8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	26.000
		9. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (jumlah kendaraan)	0,000847
		10. Jumlah orang terangkut angkutan umum	10.019.321
		11. Jumlah orang melalui terinal per tahun	650.250
36.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan layanan kependudukan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak	1. Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun	15.888
		2. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	90 %
		3. Rasio bayi ber-akta kelahiran	0,91 %
		4. Rasio pasangan berakta nikah	100 %
		5. Rasio akta kematian	3 %
		6. Kepemilikan KTP el	90 %
		7. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	557
		8. Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada
		9. Rasio KDRT	0 %
		10. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0 %
		11. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
37.	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	1.	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	119.816
		2.	Rata-rata jumlah Jiwa per kepala keluarga	3,29
38.	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana	1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,5
		2.	Rasio akseptor KB	84 %
		3.	Cakupan peserta KB aktif	142.926
39.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai	1.	Pencari kerja yang ditempatkan	50 %
		2.	Rasio informasi lowongan pekerjaan	50 %
40.	Meningkatnya prestasi pemuda di bidang olah raga secara kuantitatif dan kualitatif	1.	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	35
		2.	Jumlah kegiatan olah raga	4
		4.	Jumlah kejuaraan pemuda dan olah raga di tingkat Provinsi Jawa Tengah	3
41.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas peranan pemuda sebagai subyek dan obyek pembangunan	1.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	15
		2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	4
42.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat	1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-
		2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	37,28 %
		3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	39,51 %
43.	Penyediaan sarana prasarana olah raga	1.	Jumlah lapangan olah raga	12
44.	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu / lansia	1.	Cakupan masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	100 %
		2.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	60 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		3.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	11 %
		4.	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	73 %
45.	Meningkatkan gizi masyarakat dan status kesehatan	1.	Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	6 %
		2.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	11,50
		3.	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	15,50
		4.	Acute Flaid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	>2
		5.	Prevalensi TB paru BTA+ per 100.000 penduduk	76
		6.	Angka insidens demam berdarah dengue per 100.000 penduduk	<20
		7.	Prevalensi kusta per 10.000 penduduk	<1
46.	Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan rumah sakit umum daerah	1.	Cakupan Puskesmas terakreditasi	62 %
		2.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100 %
		3.	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam
		4.	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	1 menit
		5.	Kematian pasien kurang ≤ 24 jam	0,2 %
		6.	Kematian pasien > 48 jam	0,2 %
47.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	1.	Cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	88 %
48.	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan	1.	Cakupan Posyandu Mandiri	38 %
		2.	Cakupan Desa Siaga Aktif	100 %
49.	Meningkatkan derajat kesehatan reproduksi ibu	1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	16 kasus

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
50.	Terciptanya suasana masyarakat yang damai dan terbebas dari konflik SARA, baik horisontal maupun vertical	1.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	7.000
		2.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	2.100
		3.	Jumlah kasus konflik SARA	0
51.	Berkembangnya seni budaya lokal	1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12
52.	Terbinanya PGOT, pengedar/pengguna obat terlarang , prostitusi dan pengguna minuman keras	1.	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi rehabilitasi atau pelatihan	155 orang
53.	Terciptanya pelayanan yang baik untuk fakir miskin, anak telantar serta mayarakat kurang mampu	1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	13.355 paket
54.	Peningkatan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	5
		2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68
		3.	Jumlah LSM	115
		4.	LPM Berprestasi	2,40 %
		5.	PKK aktif	95 %
		6.	Posyandu Aktif	100 %
		7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program PKK Aktif Pemberdayaan Masyarakat	3 %
55.	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa / kelurahan	1.	Jumlah pengesahan / evaluasi APBDes	239
		2.	Jumlah desa yang administrasinya lengkap	70 %
		3.	Jumlah Kades dan Perangkat Desa yang mengikuti bimtek	25 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
56.	Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat	1.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	66,14 %
		2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	104,85 %
		3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	94,00 %
		4.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	94,16 %
		5.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	80,68 %
		6.	Angka melanjutkan SD ke SMP	100 %
		7.	Angka Putus Sekolah SD/ sederajat	0,12 %
		8.	Angka Putus Sekolah SMP/ sederajat	0,12 %
		9.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Paket C	52,25 %
		10	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C	47,89 %
		11	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan khusus terlayani	-
		12	Prosentase sarana prasarana pendidikan khusus yang terpenuhi	-
57.	Mewujudkan kualitas / mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal	1.	Angka Lulusan SD/MI	100 %
		2.	Angka Lulusan SMP/MTs	100 %
		3.	Angka Lulusan SMA/SMK/MA	100 %
		4.	Rerata Nilai UN SD/MI	7,90
		5.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	8,40
		6.	Rerata Nilau UN SMA/MA/SMK	8,40
		7.	Prosentase guru memenuhi kualifikasi S1/D4	
			a. PAUD	35 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		b. SD	90 %
		c. SMP	95 %
		d. SMA/SMK	100 %
		8. Prosentase guru bersertifikat pendidik/	
		a. TK	-
		b. SD	68 %
		c. SMP	82 %
		d. SMA/SMK	82 %
		9. Angka rata-rata lama sekolah penduduk	7
		10. Angka Melek Huruf penduduk usia produktif	98
58.	Mewujudkan dukungan sustainabilitas (berkelanjutan) lulusan anak didik sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif	1. Rasio ketersediaan sekolah menengah per Kecamatan	11,15
		2. Angka melanjutkan SMP ke SMA/ sederajat	75,10 %
		3. Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah	0,24 %
59.	Mewujudkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur	1. Prosentase sekolah memiliki sarana prasarana pembelajaran untuk pendidikan kecakapan hidup	40 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
60.	Mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan	1.	Skor LKjIP meningkat	88
		2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Prima melalui SMM ISO SKPD 9001:2000	60
		3.	Terpenuhinya standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan	90

Batang, Januari 2016

